



# **RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN**

**TAHUN  
2024**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KB**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahun pertama untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024 -2026.

Mengamati pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024 – 2026, maka realisasi capaian target kinerja dapat diuraikan sampai triwulan 2 (dua) tahun 2024 sebagai tahun pertama pelaksanaan renja dan Renstra 2024 – 2026 sesuai tujuan dan sasaran Renstra OPD, sehingga kinerja yang diharapkan mencapai tujuan dan sasaran akan menjadi jelas dan terukur.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024, Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja .

Kepada semua pihak yang telah membantu memberikan data dan informasi dalam melengkapi dan menyelesaikan rencana kerja ini kami ucapan terima kasih.

Makassar, Agustus 2024



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	1
<b>DAFTAR ISI.....</b>	2
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU .....</b>	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	54
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	78
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	80
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	112
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	114
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	114
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	115
3.3. Program dan Kegiatan Prioritas.....	115
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	117
4.1 Program dan Kegiatan .....	117
4.2 Pendanaan Program dan Kegiatan.....	121
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	135
4.1 Catatan penting .....	135
4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan .....	136
4.3 Rencana Tindak Lanjut... .....	137

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi dan misi Gubernur serta program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024, ini merupakan tahun pertama periode Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2024 - 2026 dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan tentang :

1. Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sejalan dengan rancangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode 2024 - 2026 “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. SulSel sebagai salah satu OPD bersinergi dalam mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk dapat mewujudkan rencana pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sul Sel menyusun Rencana Kerja Tahun 2024. Penyusunan Renja OPD Tahun 2024 merupakan penjabaran RPJMD Periode 2024 – 2026. Renja OPD digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD. Renja ini menguraikan lebih rinci tentang sub kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam Renstra DP3A - Dalduk KB.

## 1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** Prov. Sulsel dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tata Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 209-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ..... Tahun ..... tentang APBD Provinsi Sulawesi Selatan T.A. 2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DP3A Dalduk KB Prov. SulSel tahun 2024.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2024.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024, sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang Rencana Kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024.

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU**

Memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya dan capaian Rencana Strategis, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024.

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Menggambarkan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat program / kegiatan / Sub Kegiatan dan rumusan pendanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024 (periode Renstra tahun 2024 - 2026) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan.

**BAB V PENUTUP**

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan tindakannya.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Akhir Pelaksanaan Renstra Perubahan 2021-2023.**

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah diuraikan tentang sejauh mana target kinerja dan capaian rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan terhadap rencana capaian target kinerja program dan kegiatan (Renstra-P PD 2021 – 2023) sebagaimana dapat dilihat pada tabel T-C.29 sebagai berikut :

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pelaksana Teknis Pembangunan Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan KB. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan pada Tahun 2022.

Pagu anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2022 yang bersumber dari APBD dan DAK NF sebesar Rp. 15.436.225.282 dengan capaian realisasi kinerja fisik sebesar 99,90% dan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 14.509.490.775 atau sebesar 94%.

Sedangkan, untuk tahun 2023 pagu anggaran juga bersumber dari APBD dan DAK NF sebesar Rp. 16.919.177.905 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 16.028.708.369 atau 94,74 persen dengan capaian realisasi fisik sebesar 99,47 persen.

Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2022 dan 2023 beserta permasalahan dan rencana tindak lanjut untuk tahun berikutnya :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.

Terdapat 10 program dengan 23 kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dan 2023. Terdapat 2 indikator dalam Program Pengarusutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan yaitu : 1). Persentase pemenuhan ARG tingkat Provinsi dengan target 60 % dengan pencapaian 37 % dan 2). Persentase pemenuhan indikator prasyarat PUG tingkat Provinsi dengan target 60% dan realisasi pencapaian 60%. Sedangkan 9 program lainnya memenuhi target (100%) bahkan ada yang melebihi target yang telah ditetapkan tahun 2022 dan 2023.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.

Terdapat 10 program dengan 23 kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dan 2023. Adapun pencapaian program yang telah memenuhi target kinerja tahun 2022 dan 2023 :

**Tabel 1.**  
**Realisasi Program Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang Mendukung Pencapaian Kinerja**

No.	Program	Indikator	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
			2022	2023	2022	2023
1.	Program Pengarusutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase pemenuhan ARG di tk. Provinsi	60%	60%	37%	61%
		Persentase pemenuhan indikator prasyarat PUG tk. Provinsi	60%	60%	71%	61%
2.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase kab/kota yang menyediakan data gender dan anak yang terupdate	85%	87%	85%	87%
3.	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kab/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan yang terstandarisasi	37,5%	50%	37,5%	37,5%
		Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani	95%	95%	95%	95%
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kab/kota yang menyediakan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga yang terstandarisasi	37,5%	50%	37,5%	50%
5.	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase kab/kota layak anak	75%	83,33%	87,5%	91,6%
6.	Program Perlindungan Khusus	Persentase kab/kota yang menyedakan	37,5%	50%	37,5%	37,5%

	Anak	layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi				
7.	Program Pengendalian Kualitas Penduduk	Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di kampung KB	16,7%	25%	20,83%	25%
8.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase PUS Peserta KB Aktif	64,94%	65,34%	64,94%	65,34%
9.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase kab/kota yang meningkat Indeks Capaian Pembangunan Keluarga	16,7%	25%	16,7%	25%
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kepuasan ASN DP3A Dalduk KB terhadap layanan kesekretariatan kategori puas/sangat puas	100%	100%	100%	100%
		Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		Persentase temuan material BPK dan APIP	3%	2%	0%	0%

#### 2.1.3 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan

1. Adapun faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud disebabkan oleh masih rendahnya ketersediaan anggaran belanja program, kegiatan dan sub kegiatan, keterbatasan sdm yang kompeten dan yang terpenuhi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan ditunjang oleh ketersediaan anggaran yang cukup dan komitmen serta kinerja penanggungjawab program, kegiatan dan sub kegiatan. Selain itu, beberapa faktor penghambat dari beberapa teknis kegiatan yang kurang maksimal karena
  - Pengukuran kinerja belum dilakukan secara optimal serta evaluasi internal terkait pencapaian kinerja belum sepenuhnya memberikan gambaran atas permasalahan dan rekomendasi.
  - Keterlibatan partisipasi perempuan di tingkat parlemen yang masih tergolong rendah
  - Minimnya sinergitas antar lembaga dalam pelaksanaan advokasi dan KIE serta program bangga kencana.
  - SDM (Sumber Daya Manusia) yang terbatas, terutama SDM yang akan menjadi pelatih/fasilitator pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
  - Minimnya kegiatan peningkatan kapasitas bagi PIK-R maupun SDM lainnya yang menjalankan promosi kesehatan reproduksi.
  - Kurangnya promosi terkait layanan puspaga ke masyarakat.

- Terbatasnya SDM petugas pengelola SIGA
- Masih kurangnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- Belum terlaksananya koordinasi antar stakeholder secara maksimal.

#### 2.1.4 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Kesimpulan tentang target capaian program Renstra Perangkat Daerah pada pelaksanaan Renstra OPD (2021-2023) dapat dikatakan telah memenuhi target baik capaian program maupun kegiatan yang berimplikasi terhadap keberhasilan OPD dalam pelayanan publik.

#### 2.1.5 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu :

- a) Program dan kegiatan yang memenuhi target tetap direncanakan dan dianggarkan untuk kesinambungan sampai akhir periode Renstra.
- b) Kegiatan yang belum memenuhi target diupayakan lokasi dana yang cukup dengan melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan anggaran dan dukungan kinerja penanggungjawab kegiatan
- c) Pemantauan rencana aksi secara berkala
- d) Penguatan komitmen daerah terkait penyelenggaraan Pengarusutaman Gender di Provinsi Sulawesi Selatan
- e) Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah
- f) Kerjasama lintas sektoral, lembaga dan NGO

Tabel T-C.29. (Renstra Perubahan 2021 – 2023)

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Renstra Setelah Revisi)**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan**

1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10= (5+7+9)	11 =(10/4)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Akhir 2023	
											Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN AH PROVINSI</b>		<b>Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah</b>	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol		
			%	100	%	0	%	98	%	98	100 %	% 100
			%	2	%	0	%	3	%	3	100 %	% 3
		<b>Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik</b>	%	99	%	0	%	100	%	100	100 %	% 98
												98,99

	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	Dokumen	3	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	<b>100 %</b>	Dok	1	2	66,67
		Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	Dokumen	6	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	2	<b>100 %</b>	Dok	2	4	66,67
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersusun (Dokumen)	Dokumen	3	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	<b>100 %</b>	Dok	1	2	66,67
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang tersusun (Dokumen)	Dokumen	3	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	<b>100 %</b>	Dok	1	2	66,67
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang tersusun (Dokumen)	Dokumen	3	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	<b>100 %</b>	Dok	1	2	66,67
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang tersusun (Dokumen)	Dokumen	3	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	<b>100 %</b>	Dok	1	2	66,67
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD Yang Tersusun (Laporan)	Laporan	60	Laporan	0	Laporan	20	Laporan	20	<b>100 %</b>	Lap	20	40	66,67
		Jumlah Jenis Data dan Informasi Yang Terpublikasi (Jenis)	Jenis	20	Jenis	0	Jenis	20	Jenis	20	<b>100 %</b>	Jenis	20	20	<b>100</b>
		Jumlah dokumen laporan Evaluasi Pelaksanaan Bidang PPPA dan Dalduk KB yang tersusun (Dokumen)	Dokumen	6	Dokumen	0	Dokumen	3	Dokumen	2	100 %	Dok	2	4	66,67
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tiap bulannya selama 1 tahun (Bulan)	Bulan	36	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	12	100 %	Bulan	12	24	66,67
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun (Laporan)	Laporan	6	Laporan	0	Laporan	2	Laporan	2	100 %	Lap	2	4	66,67
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulananSemesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Laporan)	Laporan	36	Laporan	0	Laporan	12	Laporan	12	100 %	Lap	12	24	66,67
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun (Laporan)	Laporan	3	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	100 %	Lap	1	2	66,67
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rata-rata nilai perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan kinerja ASN</b>	<b>Nilai rata-rata</b>	<b>80</b>	<b>Nilai rata-rata</b>	<b>0</b>	<b>Nilai rata-rata</b>	<b>78</b>	<b>Nilai rata-rata</b>	<b>76</b>	<b>100 %</b>	<b>Nilai rata-rata</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>97,50</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia (Pasang)	Pasang	130	Pasang	0	Pasang	0	Pasang	0	100 %	Psg	65	65	50
		Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia (Pasang)	Pasang	130	Pasang	0	Pasang	0	Pasang	0	0 %	Psg	65	65	50
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun (Laporan)	Laporan	9	Laporan	0	Laporan	3	Laporan	3	100 %	Lap	3	6	66,67
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	%	<b>95</b>	%	<b>0</b>	%	<b>90</b>	%	<b>85</b>	<b>100 %</b>	%	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>94,74</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (Komponen)	Komponen	45	Komponen	0	Komponen	15	Komp	15	100 %	Komp	15	30	66,67

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia (Unit)	Unit	60	Unit	0	Unit	20	Unit	20	100 %	Unit	25	45	<b>75</b>
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis komponen barang cetakan yang tersedia (Jenis)	Jenis	6	Jenis	0	Jenis	2	Jenis	2	100 %	Jenis	2	4	66,67
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang tersedia (Jenis)	Jenis	12	Jenis	0	Jenis	4	Jenis	4	100 %	Jenis	4	8	66,67
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar unit DP3A Dalduk KB (Kali)	Kali	360	Kali	0	Kali	120	Kali	37	30,83	Kali	125	245	68,6
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Jenis arsip dinamis yang diarsipkan (Jenis)	Jenis	300	Jenis	0	Jenis	100	Jenis	100	100 %	Jenis	100	200	66,67
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem berbasis elektronik yang dimanfaatkan (Sistem)	Sistem	3	Sistem	0	Sistem	3	Sistem	3	100 %	Sistem	3	3	100
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan kantor</b>	<b>%</b>	<b>85</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>75</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>94,12</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar (Surat)	Surat	5187	Surat	0	Surat	1729	Surat	1729	100 %	Surat	1729	2958	57,3
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Periodisasi jumlah pembayaran tagihan telepon, air dan listrik selama 1 tahun (bulan)	Bulan	36	bulan	0	bulan	12	bulan	12	100 %	bulan	12	24	66,67
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	Unit	68	Unit	0	Unit	23	Unit	20	100 %	Unit	23	43	63,24

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran gaji non PNS tenaga pengelola administrasi, kebersihan dan Sopir pada unit kerja lingkup DP3A Dalduk KB untuk tiap bulannya selama 1 tahun (Bulan)	Bulan	36	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	12	100 %	Bulan	12	24	66,67
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>	%	<b>100</b>	%	<b>0</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>100 %</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang dibayarkan pajaknya (Unit)	Unit	8	Unit	0	Unit	8	Unit	8	100 %	Unit	8	8	100
		Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara (Unit)	Unit	12	Unit	0	Unit	12	Unit	12	100 %	Unit	12	12	100
		Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang dibayarkan pajaknya (Unit)	Unit	4	Unit	0	Unit	4	Unit	4	100 %	Unit	4	4	100
	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung kantor/UPTD dipelihara (unit)	Unit	2	unit	0	unit	2	Unit	2	100 %	unit	2	2	100
	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>% Kab/Kota yang memenuhi indikator prasyarat PUG</b>	%	<b>75</b>	%	<b>0</b>	%	<b>71</b>	%	<b>83,33</b>	<b>125,75 %</b>	%	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>94,67</b>
		<b>% Lembaga Penyediaan layanan Pemberdayaan Perempuan yang terstandarisasi</b>	%	<b>35</b>	%	<b>0</b>	%	<b>25</b>	%	<b>20</b>	<b>100 %</b>	%	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>71,43</b>
	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>	<b>Presentase OPD Provinsi yang Memenuhi Prasyarat PUG</b>	%	<b>90</b>	%	<b>0</b>	%	<b>85</b>	%	<b>80</b>	<b>100 %</b>	%	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>94,44</b>

	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan teknis pelaksanaan PUG yg disusun dan ditetapkan di tingkat provinsi (Dokumen)	Dokumen	6	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	3	100 %	Dok	2	5	83,33
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Focal point tingkat provinsi yang meningkat kapasitasnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi (Orang)	Orang	250	Orang	0	Orang	90	Orang	0	0	Orang	90	90	36
		Jumlah OPD dampingan yang menyusun PPRG (OPD)	OPD	125	OPD	0	OPD	45	OPD	0	0	OPD	45	45	36
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah perencana/calon fasilitator/auditor yang terlatih teknik PPRG (Orang)	Orang	155	Orang	0	Orang	50	Orang	30	100 %	Orang	50	80	51,61
		Jumlah kab/kota yang didampingi dalam pemenuhan 7 prasyarat PUG (kab/kota)	kab/kota	24	kab/kota	0	kab/kota	12	kab/kota	0	0	Kab/kota	12	12	50
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Presentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan perempuan yang mendapatkan pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, hukum dan social</b>	%	<b>35</b>	%	<b>0</b>	%	<b>25</b>	%	<b>10</b>	<b>100 %</b>	%	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan teknis pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi/politik/hukum/sosial yang disusun dan ditetapkan di tingkat provinsi (dokumen)	Dokumen	2	dokumen	0	dokumen	1	dokumen	1	100 %	Dok	0	1	50
		Jumlah kab/kota yang didampingi dalam sosialisasi panduan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi (Kab/kota)	Kab/kota	3	Kab/kota	0	Kab/kota	3	Kab/kota	3	100 %	Kab/kota	0	3	100
		Jumlah perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas bidang politik (Orang)	Orang	240	Orang	0	Orang	60	Orang	30	100 %	Orang	60	90	37,50
		Jumlah perempuan yang diberikan pelatihan kewirausahaan ekonomi (orang)	Orang	270	orang	0	orang	100	orang	50	100 %	Orang	100	150	55,56

	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi yang terstandarisasi</b>	Lembaga	31	Lembaga	0	Lembaga	10	Lembaga	0	0	Lembg	10	10	<b>66,67</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi/lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang didampingi dalam penerapan terstandarisasi (Organisasi/Lembaga)	Organisasi/ Lembaga	31	Organisasi/ Lembaga	0	Organisasi/ Lembaga	10	Organisasi/ Lembaga	0	0	Lemb	10	10	66,67
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah calon fasilitator yang terlatih dan ditetapkan menjadi fasilitator pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi/politik/hukum/sosial tingkat provinsi (Orang)	Orang	155	Orang	0	Orang	50	Orang	0	0	Orang	50	50	33,33
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>% Kab/Kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan yang terstandarisasi</b>	%	50	%	0	%	37,5	%	25	100	%	37,50	37,50	<b>75</b>
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah KabupatenKota</b>	<b>Presentase kab/kota yang difasilitasi dalam pengembangan model sinergi layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan</b>	%	17	%	0	%	13	%	8,5	100	%	13	13	<b>76,47</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi model sinergi layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan (Kab/kota)	Kab/kota	8	Kab/kota	0	Kab/kota	3	Kab/kota	2	100	Kab/kota	3	5	62,50
		Jumlah pengelola yang memperoleh peningkatan kapasitas dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (Orang)	Orang	155	Orang	0	Orang	48	Orang	60	171,42 %	Orang	48	108	69,68

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan teknis model sinergi pencegahan kekerasan perempuan lintas lembaga tingkat provinsi yang disusun (Dokumen)	Dokumen	3	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dok	1	1	33,33
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah KabupatenKota</b>	<b>Persentase perempuan/anak korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan lanjutan komprehensif pada UPT PPA Provinsi</b>	%	98	%	0	%	90	%	85	100	%	90	90	<b>91,94</b>	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah KabupatenKota	Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan pengaduan secara komprehensif pada UPT PPA Provinsi (%)	%	98	%	0	%	90	%	85	100	%	90	90	91,84	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan secara komprehensif pada UPT PPA Provinsi (%)	%	98	%	0	%	90	%	85	100	%	90	90	91,84	
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Persentase kab/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan yang terstandarisasi</b>	%	50	%	0	%	37,5	%	25	100	%	37,5	37,5	<b>71,40</b>	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yg difasilitasi dlm penyusunan mekanisme dan SOP layanan bagi perempuan korban kekerasan (Kab/kota)	Kab/kota	24	Kab/kota	0	Kab/kota	0	Kab/kota	0	Kab/kota	0	Kab/kota	6	6	25
		Jumlah kab/kota yang didampingi dalam pembentukan UPT PPA Provinsi (Kab/kota)	Kab/kota	10	Kab/kota	0	Kab/kota	0	Kab/kota	0	Kab/kota	0	Kab/kota	4	4	40

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola layanan UPT PPA/P2TP2A prov dan kab/kota yang terlatih pengelolaan layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan (Orang)	Orang	282	Orang	0	Orang	72	Orang	95	95 %	Orang	72	167	59,22
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus yang terlayani kebutuhan spesifiknya (Orang)	Orang	320	Orang	0	Orang	0	Orang	0	0	Orang	100	100	31,25
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>% Kab/Kota yang menyediakan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga</b>	%	<b>50</b>	%	<b>0</b>	%	<b>37,5</b>	%	<b>25</b>	<b>100 %</b>	%	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>	<b>71,40</b>
	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah layanan edukasi keluarga yang diedukasi oleh lembaga layanan pembelajaran keluarga tingkat provinsi</b>	Layanan	<b>24</b>	Layanan	<b>0</b>	Layanan	<b>24</b>	Layanan	<b>24</b>	<b>100 %</b>	Lay	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100</b>
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan edukasi aktif dan pasif kepada keluarga yang dilakukan lembaga layanan pembelajaran keluarga tingkat provinsi (Kali)	Kali	24	Kali	0	Kali	24	Kali	24	100 %	Kali	24	24	100
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>Persentase kab/kota yang menyediakan layanan pembelajaran keluarga terstandarisasi</b>	%	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	%	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>78,57</b>
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola puspaga yang terlatih manajemen pengelolaan layanan (orang)	Orang	180	orang	0	orang	0	orang	0	0	orang	50	50	27,78

	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah kader lembaga/ormas tingkat provinsi yang difasilitasi edukasi pengasuhan berbasis hak anak dan kesetaraan gender (Orang)	Orang	250	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	100	100	40	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang didampingi dalam pengembangan percontohan Puspaga (Kab/kota)	Kab/kota	14	Kab/kota	0	Kab/kota	4	Kab/kota	0	Kab/kota	4	4	28,57	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Persentase Kab/kota yg menyediakan Data Gender dan Anak Yg terupdate</b>	%	<b>87</b>	%	<b>0</b>	%	<b>85</b>	%	<b>82,50</b>	<b>100 %</b>	%	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>97,70</b>
	<b>Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase ketersediaan data dan informasi gender dan anak di tingkat Provinsi</b>	%	<b>87</b>	%	<b>0</b>	%	<b>85</b>	%	<b>85</b>	<b>100 %</b>	%	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>97,70</b>
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah petugas pengelola sistem informasi gender dan anak daerah yang terlatih teknis Pengaplikasian SIGA daerah (Orang)	Orang	297	Orang	101	Orang	98	Orang	101	100 %	Orang	98	198	66,67
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Gender dan Anak Yang Tersusun (Dokumen)	Dokumen	6	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dok	2	2	33,33
		Periodesasi Pelaksanaan Diseminasi KIE Gender, Pemberdayaan Perempuan, PHPA, dan Perlindungan Perempuan	Kali	18	kali	0	kali	0	Kali	0	0	kali	6	6	33,33
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK PHA</b>	<b>% kabupaten/Kota Layak Anak</b>	%	<b>83</b>	%	<b>0</b>	%	<b>75</b>	%	<b>62,5</b>	<b>107,15 %</b>	%	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>90,36</b>
	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>	<b>Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, media, dan dunia usaha</b>	%	<b>100</b>	%	<b>0</b>	%	<b>83</b>	%	<b>70,8</b>	<b>100 %</b>	%	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang didampingi dalam pemenuhan indikator KLA (Kab/kota)	Kab/kota	24	Kab/kota	0	Kab/kota	18	Kab/kota	15	88,24 %	Kab/kota	18	18	75
		Jumlah peserta forum anak sulse dan forum anak nasional (org)	Org	200	org	0	org	200	Org	200	100 %	Orang	0	200	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga mitra yang bersinergi dalam pengembangan layanan PHA (Lembaga)	Lembaga	21	Lembaga	0	Lembaga	3	Lembaga	3	100	Lemb	8	11	52,38
		Jumlah kab/kota yang meningkat level indikator KLA (Kab/kota)	Kab/kota	17	Kab/kota	0	Kab/kota	17	Kab/kota	15	88,24 %	Kab/kota	0	15	88,24
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak	%	50	%	0	%	50	%	41,67	100 %	%	50	50	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pelaksanaan pengembangan dan penyediaan fasilitas dan kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi (Orang)	Orang	50	Orang	0	Orang	100	Orang	50	100 %	Orang	0	50	100
		Jumlah pengurus forum anak daerah yang memperoleh peningkatan kapasitas di tingkat provinsi (Orang)	Orang	248	Orang	0	Orang	0	Orang	0	0	Orang	0	0	0
		Jml kab/kota yang didampingi dlm pengembangan percontohan lembaga layanan kualitas hidup anak (Kab/kota)	Kab/kota	24	Kab/kota	0	Kab/kota	12	Kab/kota	0	0	Kab/kota	12	12	50
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti workshop gugus tugas penyelenggaraan layanan pemenuhan hak anak (Orang )	Orang	110	Orang	0	Orang	50	Orang	50	100	Orang	0	100	90,91

	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah KabupatenKota	Jumlah sinergi lembaga penyedia layanan gugus tugas provinsi dan kab/kota yang dikembangkan dalam pemenuhan hak anak (Sinergi lembaga)	Sinergi Lembaga	35	Sinergi lembaga	0	Sinergi lembaga	0	Sinergi lembaga	0	Sinergi lembaga	0	Sinergi lembg	10	10	28,57
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>% Kab/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi</b>	%	50	%	0	%	37,5	%	25	100 %	%	37,5	37,5	75	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah KabupatenKota	Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam pengembangan model pencegahan kekerasan terhadap anak	%	16,7	%	0	%	16,7	%	0	0	%	16,7	16,7	100	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yg didampingi dlm Pembentukan Percontohan Desa/Kelurahan Pencegahan Terhadap AMPK (Kab/kota)	Kab/kota	8	Kab/kota	0	Kab/kota	4	Kab/kota	0	0	Kab/kota	4	4	50	
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase anak korban kekerasan yang memperoleh layanan komprehensif</b>	%	95	%	0	%	90	%	85	100 %	%	90	90	94,74	
	Pengembangan Komunikasi Informasi Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang melaksanakan kampanye pencegahan perkawinan anak (Kab/kota)	Kab/kota	24	Kab/kota	0	Kab/kota	12	Kab/kota	12	100 %	Kab/kota	12	24	100	
		Jumlah kegiatan KIE perlindungan AMPK yg dilaksanakan di tingkat provinsi/kab/kota (Kegiatan)	Kegiatan	4	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	0	Keg.	2	2	50	
		Jumlah petugas pencatatan pelaporan simfoni yang terlatih (Orang)	Orang	200	Orang	0	Orang	0	Orang	0	0	Orang	0	0	0	

	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah petugas/ pengelola lembaga layanan AMPK yang mengikuti pelatihan/ bimtek pengembangan layanan perlindungan khusus anak (Orang)	Orang	210	Orang	0	Orang	90	Orang	90	100 %	Orang	48	138	65,71
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan pendampingan AMPK prov dan kab/kota yg difasilitasi dalam peningkatan kualitas layanan (Lembaga)	Lembaga	95	Lembaga	0	Lembaga	35	Lembaga	20	100 %	Lembg	35	55	57,89
		Jumlah kab/kota yang dibina pengembangan PATBM dan yang dimonitoring dan dievaluasi (Kab/kota)	Kab/kota	12	Kab/kota	0	Kab/kota	3	Kab/kota	5	100 %	Kab/kota	3	8	66,67
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang dikuatkan dan dikembangkan di tingkat provinsi dan lintas kab/kota</b>	%	<b>50</b>	%	<b>0</b>	%	<b>37,5</b>	%	<b>0</b>	<b>0</b>	%	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>	<b>75</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah fasilitator PATBM terlatih dan tersertifikasi (Orang)	Orang	81	Orang	0	Orang	24	Orang	0	0	Orang	24	24	29,63
		Jumlah SDM /petugas pada lembaga layanan APMK tk. Provinsi dan kab/kota yg ditingkatkan pengetahuan/ ketampilannya (Orang)	Orang	145	Orang	0	Orang	60	Orang	0	0	Orang	60	60	41,38
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah model sinergi layanan perlindungan khusus anak yang dikembangkan di tingkat provinsi (Model)	Model	6	Model	0	Model	0	Model	0	0	Model	2	2	33,33

	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Kab/Kota yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di kampung KB	%	25	%	0	%	16,7	%	16,7	100 %	%	25	25	100
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kab/kota yang didampingi dalam penyusunan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	%	16,7	%	0	%	16,7	%	16,7	100 %	%	16,7	16,7	100
	Penyerasan Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga KKBPK	Jumlah kab/kota yang didampingi dalam pengembangan kampung KB percontohan (kab/kota)	kab/kota	12	kab/kota	0	kab/kota	4	kab/kota	0	0	kab/kota	4	4	33,33
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan GDPK Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan GDPK tingkat provinsi yang tersusun (dokumen)	Dokumen	1	dokumen	0	dokumen	1	dokumen	1	100 %	Dok	0	1	100
	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah kab/kota yang didampingi dalam penyusunan GDPK (kab/kota)	kab/kota	12	kab/kota	0	kab/kota	0	kab/kota	0	0	kab/kota	4	4	33,33
	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah dokumen pengendalian penduduk yang tersedia di tingkat provinsi</b>	<b>Dokumen</b>	<b>6</b>	<b>Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dok</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>33,33</b>
	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah dokumen model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan yang tersusun di tingkat provinsi (dokumen)	Dokumen	4	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	0	Dok	1	1	25

	Penyusunan Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen profil kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang tersusun di tingkat provinsi (dokumen)	Dokumen	4	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	0	Dok	1	1	25
	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA KB</b>	<b>% PUS peserta KB Aktif</b>	%	<b>65,34</b>	%	<b>0</b>	%	<b>64,94</b>	%	<b>64,14</b>	<b>100 %</b>	%	<b>64,94</b>	<b>64,94</b>	<b>99,39</b>
	<b>Pengembangan Desain Program Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Persentase kab/kota yang mengembangkan percontohan inovasi, advokasi, dan KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local</b>	%	<b>25</b>	%	<b>0</b>	%	<b>17</b>	%	<b>17</b>	<b>100 %</b>	%	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>68</b>
	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah dokumen kebijakan teknis operasional advokasi dan promosi KB sesuai kearifan lokal yang disusun di tingkat provinsi (Dokumen)	Dokumen	3	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dok	1	1	33,33
	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah lembaga/ormas mitra kerja yang ditingkatkan kapasitasnya dalam advokasi dan KIE Program KKBPK (Lembaga)	Lembaga	15	Lembaga	0	Lembaga	5	Lembaga	5	100 %	Lembg	5	10	66,67
	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam pengembangan strategi percontohan promosi dan konseling Kespro (Kab/kota)	Kab/kota	14	Kab/kota	0	Kab/kota	4	Kab/kota	0	0	Kab/kota	4	4	28,57

	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>Percentase kab/kota yang menjadi lokasi pengembangan kemitraan pengelolaan pelayanan dan kesertaan ber-KB</b>	%	25	%	0	%	0	%	0	%	17	17	68	
	Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB	Jumlah kab/kota lokasi pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB lintas kemitraan (Kab/kota)	Kab/kota	10	Kab/kota	0	Kab/kota	0	Kab/kota	0	Kab/kota	4	4	40	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA KS</b>	<b>% Kab/Kota yang meningkat capaian indeks pembangunan keluarga</b>	%	25	%	0	%	16,7	%	16,7	100 %	%	17	17	68
	<b>Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Percentase kab/kota yang difasilitasi dalam peningkatan IPK daerah</b>	%	25	%	0	%	16,7	%	0	0	%	17	17	68
	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kab/kota yg difasilitasi dalam perumusan strategi IPK (Kab/kota)	Kab/kota	14	Kab/kota	0	Kab/kota	4	Kab/kota	0	Kab/kota	4	4	28,57	
	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR di Kampung KB	Jumlah PIK-R percontohan yang dikembangkan di lokasi kampung KB percontohan (Jenis)	Jenis	14	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	4	4	28,57	
		Jumlah fasilitator PIK-R lokasi di percontohan yang terlatih (Orang)	Orang	140	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	40	40	28,57	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembimbingan Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam penguatan pengasuhan 1000 HPK (Kab/kota)	Kab/kota	14	Kab/kota	0	Kab/kota	4	Kab/kota	0	Kab/kota	4	4	28,57	

		Jumlah fasilitator Pengasuhan 1000 HPK yang terlatih (Orang)	Orang	120	Orang	0	Orang	40	Orang	0	0	Orang	40	40	33,33
	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam pembentukan percontohan BKB, BKR, BKL dan UPPKS</b>	%	<b>25</b>	%	<b>0</b>	%	<b>16,67</b>	%	<b>16,67</b>	<b>100 %</b>	%	<b>16.7</b>	<b>16,7</b>	<b>66,80</b>
	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah pengelola UPPKS yang terlatih manajemen usaha kelompok (Orang)	Orang	250	Orang	0	Orang	150	Orang	150	100 %	Orang	0	150	60
	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita BKB Bina Keluarga Remaja BKR Bina Keluarga Lansia BKL Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah fasilitator terlatih dalam pengelolaan program ketahanan keluarga (Orang)	Orang	152	Orang	0	Orang	40	Orang	0	0	Orang	40	40	26,32
		Jumlah kab/kota difasilitasi pengembangan percontohan BKB/BKR/BKL/UPPKS (Kab/kota)	Kab/kota	14	Kab/kota	0	Kab/kota	4	Kab/kota	0	0	Kab/kota	4	4	28,57



**Tabel T-C.29. (Renstra Perubahan 2021 – 2023) Penyesuaian Permen 050 5889 Tahun 2021**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Renstra Setelah Revisi)**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan**

No.	Urusan/Sbidang Urusan Pemda & Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) dan Indikator Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Renstra Perubahan Tahun 2021 S/D 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Sebelumnya (2022)				Target Program & Kegiatan (Renja Pd Tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Akhir 2023	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja Pd 2022	Tingkat Realisasi Renja	Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	Satuan	Vol	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	%	0	%	100	%	100 %	
		Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	%	2	%	0	%	4	%	100 %	
		Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	%	99	%	0	%	97	%	100 %	

	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu</b>	%	<b>100</b>	%	<b>0</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>100 %</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	Dokumen	<b>3</b>	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	<b>100 %</b>	Dok	1	2	66,67
		Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	Dokumen	<b>6</b>	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	2	<b>100 %</b>	Dok	2	4	66,67
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersusun (Dokumen)	Dokumen	<b>3</b>	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	<b>100 %</b>	Dok	1	2	66,67
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang tersusun (Dokumen)	Dokumen	<b>3</b>	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	<b>100 %</b>	Dok	1	2	66,67
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang tersusun (Dokumen)	Dokumen	<b>3</b>	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	<b>100 %</b>	Dok	1	2	66,67
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang tersusun (Dokumen)	Dokumen	<b>3</b>	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	<b>100 %</b>	Dok	1	2	66,67
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD Yang Tersusun (Laporan)	Laporan	<b>60</b>	Laporan	0	Laporan	20	Laporan	20	<b>100 %</b>	Lap	20	40	66,67
		Jumlah Jenis Data dan Informasi Yang Terpublikasi (Jenis)	Jenis	<b>20</b>	Jenis	0	Jenis	20	Jenis	20	<b>100 %</b>	Jenis	20	20	<b>100</b>
		Jumlah dokumen laporan Evaluasi Pelaksanaan Bidang PPPA dan Dalduk KB yang tersusun (Dokumen)	Dokumen	<b>6</b>	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	2	100 %	Dok	2	4	66,67
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu</b>	%	<b>100</b>	%	<b>0</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>100 %</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tiap bulannya selama 1 tahun (Bulan)	Bulan	<b>36</b>	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	12	<b>100 %</b>	Bulan	12	24	66,67
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun (Laporan)	Laporan	<b>6</b>	Laporan	0	Laporan	2	Laporan	2	<b>100 %</b>	Lap	2	4	66,67
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulananSemesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Laporan)	Laporan	<b>36</b>	Laporan	0	Laporan	12	Laporan	12	<b>100 %</b>	Lap	12	24	66,67
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun (Laporan)	Laporan	<b>3</b>	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	<b>100 %</b>	Lap	1	2	66,67
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rata-rata nilai perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan kinerja ASN</b>	Nilai rata-rata	<b>80</b>	Nilai rata-rata	<b>0</b>	Nilai rata-rata	<b>76</b>	Nilai rata-rata	<b>76</b>	<b>100 %</b>	Nilai rata-rata	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>97,50</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia (Pasang)	Pasang	130	Pasang	0	Pasang	65	Pasang	0	100 %	Psg	65	65	50
		Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia (Pasang)	Pasang	130	Pasang	0	Pasang	0	Pasang	0	0 %	Psg	65	65	50
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun (Laporan)	Laporan	9	Laporan	0	Laporan	3	Laporan	3	100 %	Lap	3	6	66,67
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	%	<b>95</b>	%	<b>0</b>	%	<b>85</b>	%	<b>85</b>	<b>100 %</b>	%	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>94,74</b>

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (Komponen)	Komponen	45	Komponen	0	Komponen	15	Komp	15	100 %	Komp	15	30	66,67
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia (Unit)	Unit	60	Unit	0	Unit	20	Unit	20	100 %	Unit	25	45	75
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis komponen barang cetakan yang tersedia (Jenis)	Jenis	6	Jenis	0	Jenis	2	Jenis	2	100 %	Jenis	2	4	66,67
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang tersedia (Jenis)	Jenis	12	Jenis	0	Jenis	4	Jenis	4	100 %	Jenis	4	8	66,67
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar unit DP3A Dalduk KB (Kali)	Kali	360	Kali	0	Kali	120	Kali	37	30,83	Kali	125	245	68,6
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Jenis arsip dinamis yang diarsipkan (Jenis)	Jenis	300	Jenis	0	Jenis	100	Jenis	100	100 %	Jenis	100	200	66,67
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem berbasis elektronik yang dimanfaatkan (Sistem)	Sistem	3	Sistem	0	Sistem	3	Sistem	3	100 %	Sistem	3	3	100
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan kantor</b>	<b>%</b>	<b>85</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>75</b>	<b>%</b>	<b>75</b>	<b>100 %</b>	<b>%</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>94,12</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar (Surat)	Surat	5187	Surat	0	Surat	1729	Surat	1729	100 %	Surat	1729	2958	57,3
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Periodisasi jumlah pembayaran tagihan telepon, air dan listrik selama 1 tahun (bulan)	Bulan	36	bulan	0	bulan	12	bulan	12	100 %	bulan	12	24	66,67
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	Unit	68	Unit	0	Unit	20	Unit	20	100 %	Unit	23	43	63,24

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran gaji non PNS tenaga pengelola administrasi, kebersihan dan Sopir pada unit kerja lingkup DP3A Dalduk KB untuk tiap bulannya selama 1 tahun (Bulan)	Bulan	36	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	12	100 %	Bulan	12	24	66,67
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>	%	100	%	0	%	100	%	100	100 %	%	100	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang dibayarkan pajaknya (Unit)	Unit	8	Unit	0	Unit	8	Unit	8	100 %	Unit	8	8	100
		Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara (Unit)	Unit	12	Unit	0	Unit	12	Unit	12	100 %	Unit	12	12	100
		Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang dibayarkan pajaknya (Unit)	Unit	4	Unit	0	Unit	4	Unit	4	100 %	Unit	4	4	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung kantor/UPTD dipelihara (unit)	Unit	2	unit	0	unit	2	Unit	2	100 %	unit	2	2	100
	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>% Kab/Kota yang memenuhi indikator prasyarat PUG</b>	%	75	%	0	%	66	%	83,33	125,75 %	%	71	71	94,67
		<b>% Lembaga Penyediaan layanan Pemberdayaan Perempuan yang terstandarisasi</b>	%	35	%	0	%	20	%	20	100 %	%	25	25	71,43
	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>	<b>Presentase OPD Provinsi yang Memenuhi Prasyarat PUG</b>	%	90	%	0	%	80	%	80	100 %	%	85	85	94,44

	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan teknis pelaksanaan PUG yg disusun dan ditetapkan di tingkat provinsi (Dokumen)	Dokumen	6	Dokumen	0	Dokumen	3	Dokumen	3	100 %	Dok	2	5	83,33
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Focal point tingkat provinsi yang meningkat kapasitasnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi (Orang)	Orang	250	Orang	0	Orang	0	Orang	0	0	Orang	90	90	36
		Jumlah OPD dampingan yang menyusun PPRG (OPD)	OPD	125	OPD	0	OPD	0	OPD	0	0	OPD	45	45	36
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah perencana/calon fasilitator/auditor yang terlatih teknik PPRG (Orang)	Orang	155	Orang	0	Orang	30	Orang	30	100 %	Orang	50	80	51,61
		Jumlah kab/kota yang didampingi dalam pemenuhan 7 prasyarat PUG (kab/kota)	kab/kota	24	kab/kota	0	kab/kota	0	kab/kota	0	0	Kab/kota	12	12	50
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Presentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan perempuan yang mendapatkan pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, hukum dan social</b>	%	35	%	0	%	10	%	10	100 %	%	25	25	25
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan teknis pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi/politik/hukum/sosial yang disusun dan ditetapkan di tingkat provinsi (dokumen)	Dokumen	2	dokumen	0	dokumen	1	dokumen	1	100 %	Dok	0	1	50
		Jumlah kab/kota yang didampingi dalam sosialisasi panduan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi (Kab/kota)	Kab/kota	3	Kab/kota	0	Kab/kota	3	Kab/kota	3	100 %	Kab/kota	0	3	100

		Jumlah perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas bidang politik (Orang)	Orang	240	Orang	0	Orang	30	Orang	30	100 %	Orang	60	90	37,50
		Jumlah perempuan yang diberikan pelatihan kewirausahaan ekonomi (orang)	Orang	270	orang	0	orang	50	orang	50	100 %	Orang	100	150	55,56
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi yang terstandarisasi</b>	<b>Lembaga</b>	<b>31</b>	<b>Lembaga</b>	<b>0</b>	<b>Lembaga</b>	<b>0</b>	<b>Lembaga</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Lembg</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>66,67</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi/lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang didampingi dalam penerapan terstandarisasi (Organisasi/Lembaga)	Organisasi/ Lembaga	31	Organisasi/ Lembaga	0	Organisasi/ Lembaga	0	Organisasi/ Lembaga	0	0	Lemb	10	10	66,67
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah calon fasilitator yang terlatih dan ditetapkan menjadi fasilitator pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi/politik/hukum/sosial tingkat provinsi (Orang)	Orang	155	Orang	0	Orang	0	Orang	0	0	Orang	50	50	33,33
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>% Kab/Kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan yang terstandarisasi</b>	<b>%</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>25</b>	<b>%</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>37,50</b>	<b>37,50</b>	<b>75</b>
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah KabupatenKota</b>	<b>Presentase kab/kota yang difasilitasi dalam pengembangan model sinergi layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan</b>	<b>%</b>	<b>17</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>8,5</b>	<b>%</b>	<b>8,5</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>76,47</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi model sinergi layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan (Kab/kota)	Kab/kota	8	Kab/kota	0	Kab/kota	2	Kab/kota	2	100	Kab/kota	3	5	62,50

		Jumlah pengelola yang memperoleh peningkatan kapasitas dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (Orang)	Orang	155	Orang	0	Orang	35	Orang	60	171,42 %	Orang	48	108	69,68
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan teknis model sinergi pencegahan kekerasan perempuan lintas lembaga tingkat provinsi yang disusun (Dokumen)	Dokumen	3	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dok	1	1	33,33
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah KabupatenKota</b>	<b>Persentase perempuan/anak korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan lanjutan komprehensif pada UPT PPA Provinsi</b>	%	98	%	0	%	85	%	85	100	%	90	90	91,94
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah KabupatenKota	Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan pengaduan secara komprehensif pada UPT PPA Provinsi (%)	%	98	%	0	%	85	%	85	100	%	90	90	91,84
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan secara komprehensif pada UPT PPA Provinsi (%)	%	98	%	0	%	85	%	85	100	%	90	90	91,84
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Persentase kab/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan yang terstandarisasi</b>	%	50	%	0	%	25	%	25	100	%	37,5	37,5	71,40
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yg difasilitasi dlm penyusunan mekanisme dan SOP layanan bagi perempuan korban kekerasan (Kab/kota)	Kab/kota	24	Kab/kota	0	Kab/kota	0	Kab/kota	0	0	Kab/kota	6	6	25
		Jumlah kab/kota yang didampingi dalam pembentukan UPT PPA Provinsi (Kab/kota)	Kab/kota	10	Kab/kota	0	Kab/kota	0	Kab/kota	0	0	Kab/kota	4	4	40

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola layanan UPT PPA/P2TP2A prov dan kab/kota yang terlatih pengelolaan layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan (Orang)	Orang	282	Orang	0	Orang	100	Orang	95	95 %	Orang	72	167	59,22
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus yang terlayani kebutuhan spesifiknya (Orang)	Orang	320	Orang	0	Orang	0	Orang	0	0	Orang	100	100	31,25
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>% Kab/Kota yang menyediakan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga</b>	%	50	%	0	%	25	%	25	100 %	%	37,5	37,5	71,40
	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah layanan edukasi keluarga yang diedukasi oleh lembaga layanan pembelajaran keluarga tingkat provinsi</b>	Layanan	24	Layanan	0	Layanan	24	Layanan	24	100 %	Lay	24	24	100
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan edukasi aktif dan pasif kepada keluarga yang dilakukan lembaga layanan pembelajaran keluarga tingkat provinsi (Kali)	Kali	24	Kali	0	Kali	24	Kali	24	100 %	Kali	24	24	100
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>		%	42	0	0	0	0	0	0	0	%	33	33	78,57
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola puspaga yang terlatih manajemen pengelolaan layanan (orang)	Orang	180	orang	0	orang	0	orang	0	0	orang	50	50	27,78

	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah kader lembaga/ormas tingkat provinsi yang difasilitasi edukasi pengasuhan berbasis hak anak dan kesetaraan gender (Orang)	Orang	250	Orang	0	Orang	0	Orang	0	0	Orang	100	100	40
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang didampingi dalam pengembangan percontohan Puspaga (Kab/kota)	Kab/kota	14	Kab/kota	0	Kab/kota	0	Kab/kota	0	0	Kab/kota	4	4	28,57
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Persentase Kab/kota yg menyediakan Data Gender dan Anak Yg terupdate</b>	%	87	%	0	%	82,50	%	82,50	100 %	%	85	85	97,70
	<b>Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase ketersediaan data dan informasi gender dan anak di tingkat Provinsi</b>	%	87	%	0	%	85	%	85	100 %	%	85	85	97,70
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah petugas pengelola sistem informasi gender dan anak daerah yang terlatih teknis Pengaplikasian SIGA daerah (Orang)	Orang	297	Orang	101	Orang	101	Orang	101	100 %	Orang	98	198	66,67
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Gender dan Anak Yang Tersusun (Dokumen)	Dokumen	6	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dok	2	2	33,33
		Periodesasi Pelaksanaan Diseminasi KIE Gender, Pemberdayaan Perempuan, PHPA, dan Perlindungan Perempuan	Kali	18	kali	0	kali	0	Kali	0	0	kali	6	6	33,33
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK PHA</b>	<b>% kabupaten/Kota Layak Anak</b>	%	83	%	0	%	58,33	%	62,5	107,15 %	%	75	75	90,36
	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>	<b>Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, media, dan dunia usaha</b>	%	100	%	0	%	70,8	%	70,8	100 %	%	85	85	85

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang didampingi dalam pemenuhan indikator KLA (Kab/kota)	Kab/kota	24	Kab/kota	0	Kab/kota	17	Kab/kota	15	88,24 %	Kab/kota	18	18	75
		Jumlah peserta forum anak sulsel dan forum anak nasional (org)	Org	200	org	0	org	200	Org	200	100 %	Orang	0	200	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga mitra yang bersinergi dalam pengembangan layanan PHA (Lembaga)	Lembaga	21	Lembaga	0	Lembaga	3	Lembaga	3	100	Lemb	8	11	52,38
		Jumlah kab/kota yang meningkat level indikator KLA (Kab/kota)	Kab/kota	17	Kab/kota	0	Kab/kota	17	Kab/kota	15	88,24 %	Kab/kota	0	15	88,24
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak</b>	%	<b>50</b>	%	<b>0</b>	%	<b>41,67</b>	%	<b>41,67</b>	<b>100 %</b>	%	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pelaksanaan pengembangan dan penyediaan fasilitas dan kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi (Orang)	Orang	50	Orang	0	Orang	50	Orang	50	100 %	Orang	0	50	100
		Jumlah pengurus forum anak daerah yang memperoleh peningkatan kapasitas di tingkat provinsi (Orang)	Orang	248	Orang	0	Orang	0	Orang	0	0	Orang	0	0	0
		Jml kab/kota yang didampingi dlm pengembangan percontohan lembaga layanan kualitas hidup anak (Kab/kota)	Kab/kota	24	Kab/kota	0	Kab/kota	0	Kab/kota	0	0	Kab/kota	12	12	50
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti workshop gugus tugas penyelenggaraan layanan pemenuhan hak anak (Orang )	Orang	110	Orang	0	Orang	50	Orang	50	100	Orang	0	100	90,91

	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah KabupatenKota	Jumlah sinergi lembaga penyedia layanan gugus tugas provinsi dan kab/kota yang dikembangkan dalam pemenuhan hak anak (Sinergi lembaga)	Sinergi Lembaga	35	Sinergi lembaga	0	Sinergi lembaga	0	Sinergi lembaga	0	0	Sinergi lembg	10	10	28,57
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>% Kab/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi</b>	%	50	%	0	%	25	%	25	100 %	%	37,5	37,5	75
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah KabupatenKota</b>	<b>Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam pengembangan model pencegahan kekerasan terhadap anak</b>	%	16.7	%	0	%	0	%	0	0	%	16.7	16,7	100
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yg didampingi dlm Pembentukan Percontohan Desa/Kelurahan Pencegahan Terhadap AMPK (Kab/kota)	Kab/kota	8	Kab/kota	0	Kab/kota	0	Kab/kota	0	0	Kab/kota	4	4	50
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase anak korban kekerasan yang memperoleh layanan komprehensif</b>	%	95	%	0	%	85	%	85	100 %	%	90	90	94,74
	Pengembangan Komunikasi Informasi Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang melaksanakan kampanye pencegahan perkawinan anak (Kab/kota)	Kab/kota	24	Kab/kota	0	Kab/kota	12	Kab/kota	12	100 %	Kab/kota	12	24	100
		Jumlah kegiatan KIE perlindungan AMPK yg dilaksanakan di tingkat provinsi/kab/kota (Kegiatan)	Kegiatan	4	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	0	Keg.	2	2	50
		Jumlah petugas pencatatan pelaporan simfoni yang terlatih (Orang)	Orang	200	Orang	0	Orang	0	Orang	0	0	Orang	0	0	0

	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah petugas/ pengelola lembaga layanan AMPK yang mengikuti pelatihan/ bimtek pengembangan layanan perlindungan khusus anak (Orang)	Orang	210	Orang	0	Orang	90	Orang	90	100 %	Orang	48	138	65,71
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan pendampingan AMPK prov dan kab/kota yg difasilitasi dalam peningkatan kualitas layanan (Lembaga)	Lembaga	95	Lembaga	0	Lembaga	20	Lembaga	20	100 %	Lembg	35	55	57,89
		Jumlah kab/kota yang dibina pengembangan PATBM dan yang dimonitoring dan dievaluasi (Kab/kota)	Kab/kota	12	Kab/kota	0	Kab/kota	5	Kab/kota	5	100 %	Kab/kota	3	8	66,67
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>Percentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang dikuatkan dan dikembangkan di tingkat provinsi dan lintas kab/kota</b>	%	<b>50</b>	%	<b>0</b>	%	<b>0</b>	%	<b>0</b>	<b>0</b>	%	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>	<b>75</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah fasilitator PATBM terlatih dan tersertifikasi (Orang)	Orang	81	Orang	0	Orang	0	Orang	0	0	Orang	24	24	29,63
		Jumlah SDM /petugas pada lembaga layanan APMK tk. Provinsi dan kab/kota yg ditingkatkan pengetahuan/ ketrampilannya (Orang)	Orang	145	Orang	0	Orang	0	Orang	0	0	Orang	60	60	41,38
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah model sinergi layanan perlindungan khusus anak yang dikembangkan di tingkat provinsi (Model)	Model	6	Model	0	Model	0	Model	0	0	Model	2	2	33,33
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Cakupan Kab/Kota yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di kampung KB</b>	%	<b>25</b>	%	<b>0</b>	%	<b>16,7</b>	%	<b>16,7</b>	<b>100 %</b>	%	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100</b>

	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Percentase kab/kota yang didampingi dalam penyusunan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk</b>	%	<b>16.7</b>	%	<b>0</b>	%	<b>16,7</b>	%	<b>16,7</b>	<b>100 %</b>	%	<b>16.7</b>	<b>16,7</b>	<b>100</b>
	Penyerasan Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga KKBPK	Jumlah kab/kota yang didampingi dalam pengembangan kampung KB percontohan (kab/kota)	kab/kota	12	kab/kota	0	kab/kota	0	kab/kota	0	0	kab/kota	4	4	33,33
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan GDPK Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan GDPK tingkat provinsi yang tersusun (dokumen)	Dokumen	1	dokumen	0	dokumen	1	dokumen	1	100 %	Dok	0	1	100
	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah kab/kota yang didampingi dalam penyusunan GDPK (kab/kota)	kab/kota	12	kab/kota	0	kab/kota	0	kab/kota	0	0	kab/kota	4	4	33,33
	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah dokumen pengendalian penduduk yang tersedia di tingkat provinsi</b>	<b>Dokumen</b>	<b>6</b>	<b>Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dok</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>33,33</b>
	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah dokumen model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan yang tersusun di tingkat provinsi (dokumen)	Dokumen	4	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	0	Dok	1	1	25
	Penyusunan Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen profil kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang tersusun di tingkat provinsi (dokumen)	Dokumen	4	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	0	Dok	1	1	25
	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA KB</b>	<b>% PUS peserta KB Aktif</b>	%	<b>65.34</b>	%	<b>0</b>	%	<b>64,14</b>	%	<b>64,14</b>	<b>100 %</b>	%	<b>64.94</b>	<b>64,94</b>	<b>99,39</b>

	<b>Pengembangan Desain Program Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Percentase kab/kota yang mengembangkan percontohan inovasi, advokasi, dan KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local</b>	%	25	%	0	%	17	%	17	100 %	%	17	17	68
	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah dokumen kebijakan teknis operasional advokasi dan promosi KB sesuai kearifan lokal yang disusun di tingkat provinsi (Dokumen)	Dokumen	3	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dok	1	1	33,33
	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah lembaga/ormas mitra kerja yang ditingkatkan kapasitasnya dalam advokasi dan KIE Program KKBPK (Lembaga)	Lembaga	15	Lembaga	0	Lembaga	5	Lembaga	5	100 %	Lembg	5	10	66,67
	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam pengembangan strategi percontohan promosi dan konseling Kespro (Kab/kota)	Kab/kota	14	Kab/kota	0	Kab/kota	0	Kab/kota	0	0	Kab/kot a	4	4	28,57
	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB</b>	<b>Percentase kab/kota yang menjadi lokasi pengembangan kemitraan pengelolaan pelayanan dan kesertaan ber-KB</b>	%	25	%	0	%	0	%	0	0	%	17	17	68
	Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB	Jumlah kab/kota lokasi pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB lintas kemitraan (Kab/kota)	Kab/kota	10	Kab/kota	0	Kab/kota	0	Kab/kota	0	0	Kab/kot a	4	4	40
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA KS</b>	<b>% Kab/Kota yang meningkat capaian indeks pembangunan keluarga</b>	%	25	%	0	%	16,7	%	16,7	100 %	%	17	17	68

	<b>Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Percentase kab/kota yang difasilitasi dalam peningkatan IPK daerah</b>	%	25	%	0	%	0	%	0	0	%	17	17	68
	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kab/kota yg difasilitasi dalam perumusan strategi IPK (Kab/kota)	Kab/kota	14	Kab/kota	0	Kab/kota	0	Kab/kota	0	0	Kab/kota	4	4	28,57
	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR di Kampung KB	Jumlah PIK-R percontohan yang dikembangkan di lokasi kampung KB percontohan (Jenis)	Jenis	14	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	0	0	Jenis	4	4	28,57
		Jumlah fasilitator PIK-R lokasi di percontohan yang terlatih (Orang)	Orang	140	Orang	0	Orang	0	Orang	0	0	Orang	40	40	28,57
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembimbingan Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam penguatan pengasuhan 1000 HPK (Kab/kota)	Kab/kota	14	Kab/kota	0	Kab/kota	0	Kab/kota	0	0	Kab/kota	4	4	28,57
		Jumlah fasilitator Pengasuhan 1000 HPK yang terlatih (Orang)	Orang	120	Orang	0	Orang	0	Orang	0	0	Orang	40	40	33,33
	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Percentase kab/kota yang difasilitasi dalam pembentukan percontohan BKB, BKR, BKL dan UPPKS</b>	%	25	%	0	%	16,67	%	16,67	100 %	%	16.7	16,7	66,80
	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah pengelola UPPKS yang terlatih manajemen usaha kelompok (Orang)	Orang	250	Orang	0	Orang	150	Orang	150	100 %	Orang	0	150	60
	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita BKB Bina Keluarga Remaja BKR Bina Keluarga Lansia BKL Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah fasilitator terlatih dalam pengelolaan program ketahanan keluarga (Orang)	Orang	152	Orang	0	Orang	0	Orang	0	0	Orang	40	40	26,32
		Jumlah kab/kota difasilitasi pengembangan percontohan BKB/BKR/BKL/UPPKS (Kab/kota)	Kab/kota	14	Kab/kota	0	Kab/kota	0	Kab/kota	0	0	Kab/kota	4	4	28,57

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Capaian kinerja pelayanan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah :

Pada tabel T-C.30 indikator yang dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, jenis indikator yang dilengkapi berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut :

**Tabel T<sub>47</sub>C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**DP3A DALDUK KB Provinsi Sulawesi Selatan**

No.	Indikator	SPM /STANDAR NASIONAL	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	15		
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	-	%	52,85	53,76	55	56	54,8	0,38	55	56	
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	-	%	23	24	26	27	25,88	27,06	26	27	
2.3	Partisipasi perempuan dilembaga swasta	-	%	74	74	74	74	74*	99	74	74	
2.4	Rasio KDRT	-	%	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07*	0,03	0,08	0,08	
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	-	%	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	4,32*	0,07	0,07	
2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	-	%	50	50	50	50	50*	65,66	50	50	
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	-	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	-	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas	-	%	54	55	55	55	55	55	55	55	
2.1	Cakupan pnegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	-	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	-	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	-	%	32	32	14	13	32	100	14	13	48
2.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	-	%	23	23	14	13	23	100	14	13	
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	-	%	104	104	105	106	104*	100.09	105	106	
2.15	Rasio APM perempuan/laki laki di SMP	-	%	106.72	106.72	102	103	106,72*	100.31	102	103	
2.16	Rasio APM perempuan/laki laki di SMA	-	%	112,3	112,3	100	101	112,2*	101.01	100	101	
2.17	Rasio APM perempuan/laki laki di perguruan tinggi	-	%	108.2	109.5	123	124	108,2*	112.04	123	124	
2.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok	-	%	100.9	100.12	99	100	100,9*	97,91*	99	100	

#### Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)		Nilai	1.12	1	1	1	0,94	0,94			
8.2	Total Fertility Rate		Nilai	2,64	2,56	2,3	2,35	2,26	2,13			
8.3	Percentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB		%	44.9	51	50	51	95,83	95,83			
8.4	Percentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk		%	80%	100%	80	82					
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/ Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk		Kebijakan	1	1	1	1					
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan		Satuan	7	7	7	8					
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan		Satuan	1	1	1	1					
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga		%	2.2	2.15	3	3					

8.9	Ratio Akseptor KB		%	67,14	67,34	73	74					
8.1	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49		%	73,57	73,57	64	65					49
8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)		%	34	32	29	29					
8.12	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun		%	22,0	22,1	23	23					
8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)		%	13,46	13,29	27	27,5					
8.14	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		%	22,5	23,2							
8.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi		%	18,45	18,80							
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB		%	72,50	72,50							
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB		%	70	70							
8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB		%	70	70							
8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan		%	23	23							
8.2	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa		%	6,52	7,12							
8.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk		%	100	100							
8.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri		%	NA	NA							
8.23	Rasio petugas Pembuatan Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan		%	98,64	98,64							
8.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat		%	0	0							
8.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkat wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan		%	75,98	74,98							
8.26	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)		%	0,04	0,04							



Hasil analisis terhadap Tabel T-C.30 terkait pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  - Tahun 2019 dari 19 indikator yang menjadi target, telah tercapai 14 indikator, melampaui target 3 indikator dan 2 indikator yang belum memenuhi target
  - Tahun 2020 dari 19 indikator yang menjadi target telah tercapai 4 indikator, melampaui target 10 indikator dan 5 indikator yang belum memenuhi target
  - Tahun 2021 dari 19 indikator yang menjadi target telah tercapai 11 indikator, melampaui target 4 indikator dan 4 indikator yang belum memenuhi target
  - Tahun 2022 dari 19 indikator yang menjadi target, telah tercapai 16 indikator, melampaui target 3 indikator dan 0 indikator yang belum memenuhi target
2. Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
  - Tahun 2019 dari 31 indikator yang menjadi target telah tercapai 26 indikator, melampaui target 3 indikator dan 2 indikator yang belum memenuhi target
  - Tahun 2020 dari 31 indikator yang menjadi target telah tercapai 11 indikator, melampaui target 11 indikator dan 9 indikator yang belum memenuhi target
  - Tahun 2021 dari 31 indikator yang menjadi target telah tercapai 11 indikator, melampaui target 14 indikator dan 6 indikator yang belum memenuhi target
  - Tahun 2022 dari 31 indikator yang menjadi target telah tercapai 18 indikator, melampaui target 7 indikator dan 6 indikator yang belum memenuhi target

Capaian indikator urusan Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB berfluktuasi dari tahun ke tahun (2019 – 2021), sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut :

1. 2019 dari 50 indikator, yang memenuhi target adalah 46 indikator dan yang tidak memenuhi target adalah 4 indikator ( 92 % tercapai dan 8 % yang belum memenuhi target)
2. 2020 dari 50 indikator, yang memenuhi target adalah 36 indikator dan yang tidak memenuhi target adalah 14 indikator ( 72 % tercapai dan 28 % yang belum memenuhi target)
3. 2021 dari 50 indikator, yang memenuhi target adalah 40 indikator dan yang tidak memenuhi target adalah 10 indikator ( 80 % tercapai dan 20 % yang belum memenuhi target)
4. 2022 dari 50 indikator, yang memenuhi target adalah 44 indikator dan yang tidak memenuhi target adalah 6 indikator ( 88 % tercapai dan 12 % yang belum memenuhi target)

### 2.2.1 Kinerja Tahun 2022

Untuk mengetahui sejauhmana Kinerja DP3A Dalduk KB tahun 2022 melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Program yang Menunjang Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu	Realisasi	% Keuangan
1.	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan	% ARG di Tingkat Provinsi	60 %	60 % %	100 %	1.198.756.300,00	1.139.892.800,00	95,08
		% Pemenuhan Indikator prasyarat PUG di Tk. Provinsi	60 %	60 % %	100 %			
		Percentase kab/kota yang menyediakan Data Gender dan Anak yang Terupdate	85 %	85 %	100 %			
2.	Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Percentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi	37,50 %	37,50 %	100 %	2.712.858.276,00	2.287.305.453,00	84,31
		Percentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Terlayani	95 %	95 %	100 %			
		Percentase kab/kota Layak Anak	75 %	75 %	100 %			
		Percentase Kab/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yg terstandarisasi	35 %	35 %	100 %			
		Percentase kab/kota yg menyediakan layanan pembelajaran keluarga yg terstandarisasi	37 %	37 %	100 %			
3.	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	25 %	25 %	100 %	798.994.900,00	751.717.556,00	94,08
		Percentase PUS peserta KB Aktif	64%	64 %	100 %			
		Percentase kab/kota yg meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga	25 %	25 %	100 %			
4.		Percentase Kepuasan ASN DP3A DALDUK KB Terhadap Layanan Kesekretariatan Kategori Puas/Sangat Puas	100 %	100 %	100 %	10.725.615.806,00	10.330.574.966,00	96,32

### 2.2.2 Kinerja 2023

Kinerja tahun 2023 sebagai tahun kelima dari implementasi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 - 2023, sebagaimana telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023, dapat disajikan seperti pada matriks realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DP3A DALDUK KB T.A 2023**

No	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik
					Rp.	Rp.	%	%
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	% Keterpenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja Tepat Waktu	100%	100%	12.168.510.038,00	11.235.281.539,00	92,33	100,00
		% Kepuasan ASN DP3ADALDUK KB terhadap layanan kesekretariatan kategori Puas/Sangat Puas	100%	100%				
		% Temuan Material BPK dan APIP	2%	0%				
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100%	100%	459.267.900,00	414.697.450,00	90,30	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok	116.777.200,00	101.572.300,00	86,98	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersusun	2 Dok	2 Dok	7.500.000,00	6.365.500,00	84,87	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang tersusun	2 Dok	2 Dok	11.886.100,00	10.660.600,00	89,69	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang tersusun	2 Dok	2 Dok	6.525.800,00	4.674.500,00	71,63	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang tersusun	2 Dok	2 Dok	7.545.800,00	6.785.300,00	89,92	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23 Laporan	23 Laporan	309.033.000,00	284.639.250,00	92,11	100,00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	% Penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	100%	60,00%	8.301.653.009,00	8.239.560.874,00	99,25	100,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN)	12 Bln	12 Bln	8.232.272.509,00	8.175.735.594,00	99,31	100,00

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	2 Laporan	2 Laporan	10.260.000,00	10.260.000,00	100,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	55.717.000,00	50.161.780,00	90,03	100,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1 Laporan	1 Laporan	3.403.500,00	3.403.500,00	100,00	100,00
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Rata-Rata 80</b>	<b>80 Nilai Rata-Rata</b>	<b>80 Nilai Rata-Rata</b>	<b>44.449.900,00</b>	<b>44.449.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	2 Paket	41.000.000,00	41.000.000,00	100,00	100 %
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen	3.449.900,00	3.449.900,00	100,00	100 %
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>1.298.102.700,00</b>	<b>710.494.613,00</b>	<b>54,73</b>	<b>100,00</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15 Paket	15 Paket	8.595.000,00	3.500.000,00	40,72	100 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlengkapan dan peralatan gedung kantor	25 Paket	25 Paket	188.322.000,00	0,00	0,00	100 %
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	48.029.100,00	37.534.900,00	78,15	100 %
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	1 Laporan	24.480.000,00	24.480.000,00	100,00	100 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	842.262.000,00	633.565.113,00	75,22	100 %
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	100 Dok	100 Dok	11.414.600,00	11.414.600,00	100,00	100 %
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dna SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan siste pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	175.000.000,00	0,00	0,00	100 %
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan kantor</b>	<b>85%</b>	<b>95%</b>	<b>1.389.426.769,00</b>	<b>1.351.714.550,00</b>	<b>97,29</b>	<b>100,00</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1 Laporan	34.949.600,00	29.983.200,00	85,79	100 %

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Laporan	1 Laporan	94.742.085,00	77.585.266,00	81,89	100 %
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	1 Laporan	1 Laporan	68.000.000,00	52.500.000,00	77,21	100 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan	1 Laporan	1.191.735.084,00	1.191.646.084,00	99,99	100 %
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>675.609.760,00</b>	<b>474.364.152,00</b>	<b>70,21</b>	<b>100,00</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 Unit	12 Unit	312.905.000,00	208.896.350,00	66,76	100 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung kantor/UPTD dipelihara	4 Unit	4 Unit	362.704.760,00	265.467.802,00	73,19	100 %
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>% ARG di Tingkat Provinsi</b>	<b>60%</b>	<b>61%</b>	<b>1.050.847.200,00</b>	<b>989.961.958,00</b>	<b>94,21</b>	<b>100,00</b>
		<b>% Pemenuhan Indikator prasyarat PUG di Tk. Provinsi</b>	<b>60%</b>	<b>61%</b>				<b>100,00</b>
	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Provinsi</b>	<b>% OPD Provinsi yang Memenuhi Prasyarat PUG</b>	<b>90%</b>	<b>95%</b>	<b>153.678.800,00</b>	<b>142.439.548,00</b>	<b>92,69</b>	<b>100,00</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jml dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	13.451.000,00	9.275.000,00	68,95	100 %
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jml perangkat daerah yang terlatih teknik PPRG	50 Perangkat Daerah	50 Perangkat Daerah	140.227.800,00	133.164.548,00	94,96	100 %
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>	<b>% perempuan pada organisasi kemasyarakatan yg mendapatkan pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial</b>	<b>35%</b>	<b>35,00%</b>	<b>897.168.400,00</b>	<b>847.522.410,00</b>	<b>94,47</b>	<b>100,00</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	24 Organisas i	24 Organisasi	897.168.400,00	847.522.410,00	94,47	50,00 %
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>% kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi</b>	<b>50,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>1.273.475.820,00</b>	<b>1.060.217.274,00</b>	<b>83,25</b>	<b>100,00</b>

		<b>% Perempuan Korban Kekerasan Yang Terlayani</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>					<b>100,00</b>
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	% kab/kota yg difasilitasi dlm pengembangan model sinergi layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	17%	17,00%	<b>155.359.700,00</b>	<b>149.500.000,00</b>	<b>96,23</b>		<b>100,00</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi (DAK)	Jml Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	149.500.000,00	149.500.000,00	100,00		100 %
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Junlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	24 Perangkat Daerah	24 Perangkat Daerah	5.859.700,00	0,00	0,00		100 %
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	% Perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan lanjutan komprehensif pada UPT PPA Provinsi	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>893.227.020,00</b>	<b>690.361.800,00</b>	<b>77,29</b>		<b>100,00</b>
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan dan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	60 Orang%	60 Orang%	546.387.020,00	471.589.380,00	86,31		100 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (DAK)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	24 Layanan	24 Layanan	346.840.000,00	218.772.420,00	63,08		100 %
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	% kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi	<b>50,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>224.889.100,00</b>	<b>220.355.474,00</b>	<b>97,98</b>		<b>100,00</b>
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jml Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	110 Orang	110 Orang	224.889.100,00	220.355.474,00	97,98		100 %
<b>4.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	% kab/kota yg menyediakan Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga (Prioritas)	<b>50%</b>	<b>75%</b>	<b>710.268.024,00</b>	<b>672.316.108,00</b>	<b>94,66</b>		<b>100,00</b>

	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan edukasi Keluarga yang diberikan oleh lembaga layanan pembelajaran keluarga tingkat provinsi	24 Layanan	24 Layanan	703.909.224,00	668.688.908,00	95,00	100,00
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	703.909.224,00	668.688.908,00	95,00	100 %
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>	% kab/kota yang menyediakan layanan pembelajaran keluarga terstandarisasi	42%	42%	6.358.800,00	3.627.200,00	57,04	100,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	6 Lembaga	6 Lembaga	6.358.800,00	3.627.200,00	57,04	100 %
<b>5.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Kab/kota yg menyediakan Data Gender dan Anak Yg terupdate</b>	<b>87%</b>	<b>89%</b>	<b>178.215.000,00</b>	<b>168.160.200,00</b>	<b>94,36</b>	<b>100,00</b>
	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>% Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tingkat Provinsi yang Terupdate</b>	<b>87%</b>	<b>90%</b>	<b>178.215.000,00</b>	<b>168.160.200,00</b>	<b>94,36</b>	<b>100,00</b>
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	78.087.000,00	68.160.200,00	87,29	100 %
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	100.128.000,00	100.000.000,00	99,87	100 %
<b>6.</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>% kabupaten/kota layak anak</b>	<b>83%</b>	<b>91,66%</b>	<b>430.098.100,00</b>	<b>368.846.929,00</b>	<b>85,76</b>	<b>100,00</b>
	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>	<b>% Kab/kota yg difasilitasi dlm pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, media, dan dunia usaha</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>124.621.100,00</b>	<b>82.623.604,00</b>	<b>66,30</b>	<b>100,00</b>

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Meida dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	10 Organisasi	10 Organisasi	124.621.100,00	82.623.604,00	66,30	100 %
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>% Kab/kota yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>305.477.000,00</b>	<b>286.223.325,00</b>	<b>93,70</b>	<b>100,00</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jml Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	305.477.000,00	286.223.325,00	93,70	100 %
7.	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>% Kab/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi</b>	<b>50%</b>	<b>60%</b>	<b>522.946.200,00</b>	<b>476.691.310,00</b>	<b>91,15</b>	<b>100,00</b>
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>% Kab/kota yg difasilitasi dlm pengembangan model pencegahan kekerasan terhadap anak</b>	<b>16,70%</b>	<b>16,70%</b>	<b>391.662.000,00</b>	<b>370.997.710,00</b>	<b>94,72</b>	<b>7,00 %</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jml Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	24 Organisasi	24 Organisasi	391.662.000,00	370.997.710,00	94,72	100 %
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>% Anak korban kekerasan yang memperoleh layanan komprehensif</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>29.625.200,00</b>	<b>18.773.600,00</b>	<b>63,37</b>	<b>100,00</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	40 Lyanan	40 Lyanan	29.625.200,00	18.773.600,00	63,37	100 %

	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	% Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang dikuatkan dan dikembangkan di tingkat provinsi dan lintas kab/kota	50,00%	50,00%	101.659.000,00	86.920.000,00	85,50	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	101.659.000,00	86.920.000,00	85,50	100 %
8.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	25%	25%	231.349.000,00	42.293.667,00	18,28	100,00
	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	% Kab/kota yang didampingi dalam penyusunan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	16,70%	16,70%	231.349.000,00	42.293.667,00	18,28	100,00
	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1 Laporan	1 Laporan	231.349.000,00	42.293.667	18,28	100 %
	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Pengendalian Penduduk yang Tersedia di TKProvinsi	2 Dokumen	0 Dokumen	-	-	0,00	0,00
	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	0 Dokumen	-	0,00	0,00	0,00
9.	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	% PUS peserta KB Aktif	65,34%	60%	96.359.200,00	87.976.200,00	91,30	100,00
	<b>Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	% Kab/kota yang mengembangkan percontohan inovasi, advokasi, dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	25%	25,00%	96.359.200,00	87.976.200,00	91,30	100,00
	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra KERJA	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	96.359.200,00	87.976.200,00	91,30	100 %

	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kespro	1 Laporan	0 Laporan	-	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>% Kab/kota yg meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga</b>	<b>25%</b>	<b>25,00%</b>	<b>1.749.347.900,00</b>	<b>1.589.450.852,00</b>	<b>90,86</b>	<b>100,00</b>
	<b>Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pebinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>% Kab/kota yang difasilitasi dalam peningkatan IPK daerah</b>	<b>16,7%</b>	<b>7,51%</b>	<b>1.749.347.900,00</b>	<b>1.589.450.852,00</b>	<b>90,86</b>	<b>100,00</b>
	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen Hasil pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	429.080.000,00	418.830.000,00	97,61	100 %
	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan 1000 HPK	1 Dokumen	1 Dokumen	1.320.267.900,00	1.170.620.852,00	88,67	100 %
<b>TOTAL</b>			<b>18.411.416.482,00</b>			<b>16.691.196.037,00</b>	<b>90,66</b>	<b>100,00</b>

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Peningkatan kinerja perangkat daerah melalui koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan, sebagai gambaran bahwa tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah telah diselenggarakan sesuai kewenangan masing-masing

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dilakukan dengan menggunakan diskusi dengan bidang-bidang terkait dan ditetapkan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

**1) Bidang Pemberdayaan Perempuan :**

- a. Rendahnya keberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum
- b. Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang belum terstandarisasi.

**2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak:**

- a. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum dapat dikendalikan bahkan meningkat setiap tahun.
- b. Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak di kab/kota sebagian besar belum terstandarisasi
- c. Masih tingginya anak tidak sekolah

**3) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:**

- a. Belum maksimalnya upaya pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk
- b. Belum maksimalnya pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi penguatan ketahanan keluarga
- c. Masih tingginya Stunting

**4) Permasalahan terkait kesekretariatan:**

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan umum dan perkantoran.
- b. Masih belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan Tugas dan Fungsi.
- c. Belum Maksimalnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan perangkat daerah.

3. Program/kegiatan yang direncanakan dan telah diimplementasikan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian program nasional/internasional (SDGs)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah
  - a. *Tantangan dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah*
    - 1) Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
    - 2) Pelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
    - 3) Lembaga layanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten/kota belum terstandarisasi, baik dari aspek sarana prasarana fisik, petugas layanan, dan mekanisme layanan.
    - 4) Upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan perlindungan perempuan dan anak belum menjadi isu prioritas daerah.
    - 5) Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak serta perlindungan khusus anak yang belum berjalan secara efektif.
    - 6) Pemahaman kesetaraan gender dan pengasuhan yang berbasis hak anak dalam keluarga relative rendah.
    - 7) Adanya norma budaya dan pemahaman agama yang keliru di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
    - 8) Lembaga layanan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum yang belum terstandarisasi.
    - 9) Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui penerapan indicator Ketahanan Keluarga masih Kurang.
    - 10) Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
    - 11) Tenaga kerja perempuan terutama di sektor informal jenisnya sangat luas dan kondisinya dinamis, serta belum mendapat perhatian serius pemerintah dalam hal permodalan, teknologi, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesejahteraan dan jaminan kesehatan;
    - 12) Rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, dan organisasi-organisasi profesi lainnya;
    - 13) Peluang kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih jauh lebih rendah dari laki-laki.
  - b. *Peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah*
    - 1) Komitmen pemerintah melalui diterbitkannya peraturan perundangan yang mengatur secara kebijakan, teknis dan operasional upaya-upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak;

- 2) Menguatnya isu-isu Sustainability Development Goals;
- 3) Penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan semakin dirasakan untuk memudahkan koordinasi dalam melakukan penataan kelembagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan di Kabupaten/Kota, termasuk Pembentukan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
- 4) Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- 5) Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- 6) Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- 7) Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 8) Meningkatnya upaya pembinaan aparatur dalam rangka memantapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik serta mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi melalui upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

- a. Program dan kegiatan yang mendukung penurunan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk penyediaan layanan perempuan dan anak korban kekerasan yg terstandarisasi menjadi prioritas utama dalam perumusan program dan kegiatan pada tahun 2024
- b. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator prasyarat PUG dan penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi termasuk prioritas utama dalam perumusan program dan kegiatan pada tahun 2024
- c. Program dan kegiatan penunjang penurunan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk penyediaan layanan perempuan dan anak korban kekerasan yg terstandarisasi serta pencapaian indikator prasyarat PUG dan penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi tetap dianggarkan dalam perumusan program dan kegiatan pada tahun 2024
- d. Program dan kegiatan lain tetap dianggarkan dalam perumusan program dan kegiatan pada tahun 2024 dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Proses Review yang dilakukan dalam rangka membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, yang bertujuan melakukan penyesuaian apabila terdapat perbedaan terhadap rancangan awal RKPD seperti terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sesuai tetapi anggaran berbeda dan adapun hasil Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel T-C.31**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**

**Nama Perangkat Daerah : DP3A Dalduk KB**

**Lembar.....dari.....**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PUG DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pemenuhan Indikator prasyarat PUG di Tk. Provinsi		65%	895.961.700,-	PROGRAM PUG DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pemenuhan Indikator prasyarat PUG di Tk. Provinsi		65%	895.961.700,-	
		Persentase ARG di Tingkat Provinsi		40%			Persentase ARG di Tingkat Provinsi		40%		
		Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi		35,50%			Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi		35,50%		
1	2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase OPD Provinsi yang Memenuhi Prasyarat PUG		85,50%	375.961.700,-	2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase OPD Provinsi yang Memenuhi Prasyarat PUG		85,50%	375.961.700,-	
01.01	2.08.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	1 Dokumen	50.961.700,-	2.08.02.1.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan PUG di Tingkat Provinsi	Kab/Kota	1 Kebijakan	50.961.700,-	

01.03	2.08.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	48 Orang	210.000.000,-	2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Tk. Provinsi yang Memperoleh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Kab/Kota	48 Dokumen	210.000.000,-	
01.02	2.08.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Kota Makassar	1 Dok	115.000.000,-	2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Tingkat Provinsi	Kota Makassar	1 Laporan	115.000.000,-	
2	<b>2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan perempuan yg mendapatkan pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan social</b>		<b>25,50%</b>	<b>520.000.000,-</b>	<b>2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan perempuan yg mendapatkan pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan social</b>		<b>25,50%</b>	<b>520.000.000,-</b>	

02.02	2.08.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	Kab/Kota	48 Organisasi	520.000.000,-	2.08.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan/Profesi/dua usaha/media tingkat provinsi yang diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik , Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab/Kota	48 Lembaga	520.000.000,-	
3	<b>2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi yg terstandarisasi</b>		<b>0 lembaga</b>	-	<b>2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi yg terstandarisasi</b>		<b>0 lembaga</b>	-	
03.01	2.08.02.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab/Kota	0 lembaga	-	2.08.02.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab/Kota	0 lembaga	-	
03.02	2.08.02.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab/Kota	0 Orang	-	2.08.02.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi / Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pada LPLPP Tingkat Provinsi	Kab/Kota	24 Orang	-	

II	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN (PRIORITAS)	Persentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi		54,16%	1.451.521.333,-	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN (PRIORITAS)	Persentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi		54,16%	1.451.521.333,-	
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Terlayani		95%			Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Terlayani		95%		
1	2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kab/kota yg difasilitasi dlm pengembangan model sinergi layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan		13,50%	244.521.333,-	2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kab/kota yg difasilitasi dlm pengembangan model sinergi layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan		13,50%	244.521.333,-	
01.01	2.08.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi (Sumber Dana DAK Non Fisik)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		1 Dokumen	150.000.000	2.08.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi (Sumber Dana DAK Non Fisik)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		1 Dokumen	150.000.000	
01.02	2.08.03.1.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	24 Perangkat Daerah	94.521.333,-	2.08.03.1.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		Kab/Kota	24 Perangkat Daerah	94.521.333,-

2	<b>2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perempuan/anak korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan lanjutan komprehensif pada UPT PPA Provinsi</b>		<b>95%</b>	<b>1.002.000.000,-</b>	<b>2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perempuan/anak korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan lanjutan komprehensif pada UPT PPA Provinsi</b>		<b>95%</b>	<b>1.002.000.000,-</b>	
02.01	2.08.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota yang Mendapatkan Layanan	Kab/Kota	48 Orang	655.000.000,-	2.08.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan	Kab/Kota	48 Orang	655.000.000,-	
02.02	2.08.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi <b>(Sumber Dana DAK Non Fisik)</b>	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Kab/Kota	24 Layanan	347.000.000,-	2.08.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi <b>(Sumber Dana DAK Non Fisik)</b>	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Kab/Kota	24 Layanan	347.000.000,-	
3	<b>2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Persentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi</b>		<b>37,75%</b>	<b>205.000.000,-</b>	<b>2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Persentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi</b>		<b>37,75%</b>	<b>205.000.000,-</b>	

03.01	2.08.03.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	2 Laporan	75.000.000,-	2.08.03.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	2 Laporan	75.000.000,-
03.02	2.08.03.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab/Kota	48 Orang	105.000.000,-	2.08.03.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab/Kota	48 Orang	105.000.000,-
03.03	2.08.03.1.03.03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Kab/Kota	24 Orang	25.000.000,-	2.08.03.1.03.03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Kab/Kota	24 Orang	25.000.000,-
III	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Persentase kab/kota yg menyediakan lembaga layanan Peningkatan Kualitas Keluarga</b>		<b>50,16%</b>	<b>800.308.024,-</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Persentase kab/kota yg menyediakan lembaga layanan Peningkatan Kualitas Keluarga</b>		<b>50,16%</b>	<b>800.308.024,-</b>
1	<b>2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah layanan edukasi Keluarga yang diedukasi oleh lembaga layanan pembelajaran keluarga tingkat provinsi</b>		<b>24 layanan</b>	<b>730.000.000,-</b>	<b>2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah layanan edukasi Keluarga yang diedukasi oleh lembaga layanan pembelajaran keluarga tingkat provinsi</b>		<b>24 layanan</b>	<b>730.000.000,-</b>

02.02	2.08.04.1.02.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Bagi Anak bagi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Kota Makassar	3 Dokumen	730.000.000,-	2.08.04.1.02.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Bagi Anak bagi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Kota Makassar	<sup>3</sup> Dokumen	730.000.000,-	
2	<b>2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan dan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>Percentase kab/kota yang menyediakan layanan pembelajaran keluarga terstandarisasi</b>		<b>45%</b>	<b>70.308.024,-</b>	<b>2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan dan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>Percentase kab/kota yang menyediakan layanan pembelajaran keluarga terstandarisasi</b>		<b>45%</b>	<b>70.308.024,-</b>	
01.01	2.08.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab/kota	24 Lembaga	25.308.024,-	2.08.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab/kota	<sup>24</sup> Lembaga	25.308.024,-	
02.02	2.08.04.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab/Kota	48 Orang	25.000.000,-	2.08.04.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab/Kota	48 Orang	25.000.000,-	

02.03	2.08.04.1.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	1 Dokumen	20.000.000,-	2.08.04.1.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	1 Dokumen	20.000.000,-	
IV	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Percentase kab/kota yang menyediakan Data Gender dan Anak yang Terupdate</b>		<b>88%</b>	<b>415.000.000,-</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Percentase kab/kota yang menyediakan Data Gender dan Anak yang Terupdate</b>		<b>88%</b>	<b>415.000.000,-</b>	
1	<b>2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Percentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tingkat Provinsi</b>		<b>86%</b>	<b>415.000.000,-</b>	<b>2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Percentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tingkat Provinsi</b>		<b>86%</b>	<b>415.000.000,-</b>	
01.01	2.08.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Kab/Kota	2 Dokumen	260.000.000,-	2.08.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Kab/Kota	2 Dokumen	260.000.000,-	
01.02	2.08.05.1.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Kab/Kota	2 Dokumen	155.000.000,-	2.08.05.1.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Kab/Kota	2 Dokumen	155.000.000,-	
V	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (Prioritas)</b>	<b>Percentase kab/kota Layak Anak</b>		<b>87,50%</b>	<b>472.705.000,-</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (Prioritas)</b>	<b>Percentase kab/kota Layak Anak</b>		<b>87,50%</b>	<b>472.705.000,-</b>	
1	<b>2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha</b>	<b>Percentase kab/kota yg difasilitasi dlm pelembagan PHA pada lembaga pemerintah, media, dan dunia usaha</b>		<b>84%</b>	<b>182.705.000,-</b>	<b>2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha</b>	<b>Percentase kab/kota yg difasilitasi dlm pelembagan PHA pada lembaga pemerintah, media, dan dunia usaha</b>		<b>84%</b>	<b>182.705.000,-</b>	

	<b>Kewenangan Provinsi</b>					<b>Kewenangan Provinsi</b>					
01.01	2.08.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha	Kab/Kota	24 Organisasi	150.000.000,-	2.08.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	24 Organisasi	150.000.000,-	
01.02	2.08.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	1 Dokumen	32.705.000,-	2.08.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	1 Dokumen	32.705.000,-	
2	<b>2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak</b>		<b>55%</b>	<b>290.000.000,-</b>	<b>2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak</b>		<b>55%</b>	<b>290.000.000,-</b>	
02.01	2.08.06.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas	Kab/Kota	1 Dokumen	150.000.000,-	2.08.06.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	1 Dokumen	150.000.000,-	

	Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Hidup Anak Kewenangan Provinsi				Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi					
02.02	2.08.06.1.02.02 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	Kab/Kota	48 Orang	65.000.000,-	2.08.06.1.02.02 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Kab/Kota	Kab/Kota	48 Orang	65.000.000,-	
02.03	2.08.06.1.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas hidup anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab/Kota	2 Dokumen	75.000.000,-	2.08.06.1.02..... Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas hidup anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab/Kota	2 Dokumen	75.000.000,-	
VI	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (Prioritas)</b>	<b>Persentase Kab/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi</b>		<b>54,16%</b>	<b>565.092.400,-</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (Prioritas)</b>	<b>Persentase Kab/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi</b>		<b>54,16%</b>	<b>565.092.400,-</b>	
1	<b>2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kab/kota yg difasilitasi dlm pengembangan model pencegahan kekerasan terhadap anak</b>		<b>17%</b>	<b>225.000.000</b>	<b>2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kab/kota yg difasilitasi dlm pengembangan model pencegahan kekerasan terhadap anak</b>		<b>17%</b>	<b>225.000.000</b>	
01.01	2.08.07.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan	Kab/Kota	24 Organisasi	225.000.000,-	2.08.07.1.01.0003 Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang memperoleh Advokasi dan Pendampingan Dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	24 Orang	225.000.000,-	

	Provinsi	Anak Kewenangan Provinsi									
2	<b>2.08.07.1.02</b> <b>Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase anak korban kekerasan yang memperoleh layanan komprehensif</b>		<b>90,50%</b>	<b>165.092.400,-</b>	<b>2.08.07.1.02</b> <b>Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase anak korban kekerasan yang memperoleh layanan komprehensif</b>		<b>90,50%</b>	<b>165.092.400,-</b>	
02.01	2.08.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	Kab/Kota	24 Orang	75.092.400	2.08.07.1.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	40 Orang	75.092.400	
02.02	2.08.07.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan anak Yang Memerluka Perlindungan Khsus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	24 Layanan	55.000.000,-	2.08.07.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan anak Yang Memerluka Perlindungan Khsus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khsus Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	24 Layanan	55.000.000,-	
02.03	2.08.07.1.02.03 Pengembangan komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	3 Dokumen	35.000.000,-	2.08.07.1.02.03 Pengembangan komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	3 Dokumen	35.000.000,-	

3	<b>2.08.07.1.03</b> <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Percentase Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang dikuatkan dan dikembangkan di tingkat provinsi dan lintas kab/kota		38%	175.000.000,-	<b>2.08.07.1.03</b> <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Percentase Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang dikuatkan dan dikembangkan di tingkat provinsi dan lintas kab/kota		38%	175.000.000,-	
03.02	2.08.07.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	1 Dokumen	130.000.000,-	2.08.07.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	1 Dokumen	130.000.000,-	
03.03	2.08.07.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	1 Dokumen	45.000.000,-	2.08.07.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	1 Dokumen	45.000.000,-	
VII	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB</b>		<b>25,50%</b>	<b>210.000.000,-</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB</b>		<b>25,50%</b>	<b>210.000.000,-</b>	

1	<b>2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	Percentase kab/kota yang didampingi dalam penyusunan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk		17%	150.000.000,-	<b>2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	Percentase kab/kota yang didampingi dalam penyusunan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk		17%	150.000.000,-	
01.01	2.14.02.1.01.01 Penyerasan Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasan Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Kab/Kota	1 Domumen	100.000.000,-	2.14.02.1.01.01 Penyerasan Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasan Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Kab/Kota	1 Domumen	100.000.000,-	
01.03	2.14.02.1.01.03 Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah kab/kota yg didampingi dlm penyusunan GDPK	Kab/Kota	1 Laporan	50.000.000	2.14.02.1.01.03 Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah kab/kota yg didampingi dlm penyusunan GDPK	Kab/Kota	1 Laporan	50.000.000	
2	<b>2.14.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah dokumen pengendalian penduduk yg tersedia di tk provinsi</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>60.000.000,-</b>	<b>2.14.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah dokumen pengendalian penduduk yg tersedia di tk provinsi</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>60.000.000,-</b>	
02.02	2.14.02.1.02.02 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab/Kota	1 Domumen	60.000.000,-	2.14.02.1.02.02 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab/Kota	1 Domumen	60.000.000,-	
VIII	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Percentase PUS peserta KB Aktif</b>		<b>65,35%</b>	<b>215.000.000,-</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Percentase PUS peserta KB Aktif</b>		<b>65,35%</b>	<b>215.000.000,-</b>	

1	<b>2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	Persentase kab/kota yang mengembangkan percontohan inovasi, advokasi, dan KIE Pengembalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal		17,25%	215.000.000,-	<b>2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	Persentase kab/kota yang mengembangkan percontohan inovasi, advokasi, dan KIE Pengembalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal		17,25%	215.000.000,-	
01.01	2.14.03.1.01.01 Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Kab/Kota	0 Laporan	-	2.14.03.1.01.01 Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Kab/Kota	0 Laporan	-	
01.04	2.14.03.1.01.04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Kab/Kota	1 Dokumen	100.000.000,-	2.14.03.1.01.04 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Kab/Kota	1 Dokumen	100.000.000,-	
01.08	2.14.03.1.01.08 Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Kab/Kota	1 Laporan	115.000.000,-	2.14.03.1.01.08 Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Kab/Kota	1 Laporan	115.000.000,-	
2	<b>2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan</b>	Persentase kab/kota yang menjadi lokasi pengembangan kemitraan pengelolaan pelayanan dan kesertaan ber-KB		25,50%	-	<b>2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan</b>	Persentase kab/kota yang menjadi lokasi pengembangan kemitraan pengelolaan pelayanan dan kesertaan ber-KB		25,50%	-	

	<b>Kesertaan Ber-KB</b>					<b>Ber-KB</b>					
02.01	2.14.03.1.02.01 Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab/Kota	0 Dokumen	-	2.14.03.1.02.01 Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab/Kota	0 Dokumen	-	
IX	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA</b>	<b>Persentase kab/kota yg meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga</b>		<b>25,50%</b>	<b>1.005.000.000,-</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA</b>	<b>Persentase kab/kota yg meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga</b>		<b>25,50%</b>	<b>1.005.000.000,-</b>	
1	<b>2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam peningkatan IPK daerah</b>		<b>17,50%</b>	<b>755.000.000,-</b>	<b>2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam peningkatan IPK daerah</b>		<b>17,50%</b>	<b>755.000.000,-</b>	
01.03	2.14.04.1.01.03 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Kab/Kota	1 Dokumen	77.500.000,-	2.14.04.1.01.03 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab/Kota	1 Dokumen	77.500.000,-	

	Keluarga	Keluarga									
01.08	2.14.04.1.01.08 Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Kab/Kota	1 Organisasi	77.500.000,-	2.14.04.1.01.08 Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Kab/Kota	1 Organisasi	77.500.000,-	
01.14	2.14.04.1.01.14 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Kab/Kota	1 Dokumen	600.000.000,-	2.14.04.1.01.14 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Kab/Kota	1 Dokumen	600.000.000,-	
2	<b>2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam pembentukan percontohan BKB, BKR, BKL, dan UPPKS</b>		<b>25,50%</b>	<b>250.000.000,-</b>	<b>2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam pembentukan percontohan BKB, BKR, BKL, dan UPPKS</b>		<b>25,50%</b>	<b>250.000.000,-</b>	

02.04	2.14.04.1.02.04 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengeolaan Program Keluarga Melalui Bina Keluarga (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Kab/Kota	1 Dokumen	100.000.000,-	2.14.04.1.02.04 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengeolaan Program Keluarga Melalui Bina Keluarga (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Kab/Kota	1 Dokumen	100.000.000,-
02.02	2.14.04.1.02.02 Penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Kab/Kota	1 Laporan	150.000.000,-	2.14.04.1.02.02 Penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pemberdayaan ekonomi keluarga	Kab/Kota	1 Laporan	150.000.000,-
X	<b>X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Rata - Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah</b>		<b>Nilai 79</b>	<b>12.323.500.001,0 0</b>	<b>X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Rata - Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah</b>		<b>Nilai 79</b>	<b>12.323.500.001, 00</b>
		Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah		Nilai 95			Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah		Nilai 95	
		Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindak Lanjuti		100%			Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindak Lanjuti		100%	

1	<b>X.XX.01.1.01</b> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu</b>		<b>100%</b>	<b>600.000.000,-</b>	<b>X.XX.01.1.01</b> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu</b>		<b>100%</b>	<b>600.000.000,-</b>	
01.01	X.XX.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	2 Dok	193.000.000,-	X.XX.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	2 Dok	193.000.000,-	
01.02	X.XX.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	1 Dok	8.500.000,-	X.XX.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	1 Dok	8.500.000,-	
01.03	X.XX.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Makassar	1 Dok	8.500.000,-	X.XX.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	1 Dok	8.500.000,-	
01.04	X.XX.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Makassar	1 Dok	7.500.000,-	X.XX.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Makassar	1 Dok	7.500.000,-	
01.05	X.XX.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Makassar	1 Dok	7.500.000,-	X.XX.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Makassar	1 Dok	7.500.000,-	

01.06	X.XX.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	6 Laporan	250.000.000,-	X.XX.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	6 Laporan	250.000.000,-	
01.07	X.XX.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	1 Laporan	125.000.000,-	X.XX.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	1 Laporan	125.000.000,-	
2	<b>X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu</b>		<b>100%</b>	<b>8.545.000.000,87</b>	<b>X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu</b>		<b>100%</b>	<b>8.545.000.000,87</b>	
02.01	X.XX.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	12 Bulan	8.450.000.000,87	X.XX.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	12 Bulan	<b>8.545.000.000,87</b>	
02.05	X.XX.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar	2 Laporan	25.000.000,-	X.XX.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar	2 Laporan	25.000.000,-	
02.07	X.XX.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Makassar	12 Laporan	65.000.000,-	X.XX.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Makassar	12 Laporan	65.000.000,-	

02.08	X.XX.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Makassar	1 Dokumen	5.000.000,-	X.XX.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Makassar	1 Dokumen	5.000.000,-	
3	<b>X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat Daerah berdasarkan kinerja ASN</b>		Nilai Rata- Rata 78,5	80.000.000,-	<b>X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat Daerah berdasarkan kinerja ASN</b>		Nilai Rata- Rata 78,5	80.000.000,-	
05.02	X.XX.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Makassar	1 Paket	75.000.000,-	X.XX.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Makassar	1 Paket	75.000.000,-	
02.03	X.XX.01.1.02.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Makassar	3 Dokumen	5.000.000,-	X.XX.01.1.02.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Makassar	3 Dokumen	5.000.000,-	
4	<b>X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		90%	912.335.900	<b>X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		90%	912.335.900	
06.01	X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Makassar	5 Paket	8.500.000,-	X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Makassar	5 Paket	8.500.000,-	
06.02	X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Makassar	18 Paket	225.000.000,-	X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Makassar	18 Paket	225.000.000,-	
06.05	X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Makassar	2 Paket	45.000.000,-	X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Makassar	2 Paket	45.000.000,-	
06.08	X.XX.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	4 Laporan	75.000.000,-	X.XX.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	4 Laporan	75.000.000,-	

06.09	X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab/Kota	5 Laporan	730.000.000,-	X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab/Kota	5 Laporan	730.000.000,-	
06.10	X.XX.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	100 Dokumen	25.000.000,-	X.XX.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	100 Dokumen	25.000.000,-	
06.11	X.XX.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Makassar	3 Dokumen	175.000.000,-	X.XX.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Makassar	3 Dokumen	175.000.000,-	
5	<b>X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan kantor</b>		<b>85%</b>	<b>1.040.000.000,-</b>	<b>X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan kantor</b>		<b>85%</b>	<b>1.040.000.000,-</b>	
08.01	X.XX.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	1500 Laporan	35.000.000,-	X.XX.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	1500 Laporan	35.000.000,-	
08.02	X.XX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Makassar	3 Laporan	120.000.000,-	X.XX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Makassar	3 Laporan	120.000.000,-	
08.03	X.XX.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Makassar	5 Laporan	35.000.000,-	X.XX.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Makassar	5 Laporan	35.000.000,-	
08.04	X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Makassar	12 Laporan	850.000.000,-	X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Makassar	12 Laporan	850.000.000,-	

6	<b>X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>		<b>100%</b>	<b>775.000.000,-</b>	<b>X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>		<b>100%</b>	<b>775.000.000,-</b>	
09.02	X.XX.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Makassar	12 Unit	400.000.000,-	X.XX.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Makassar	12 Unit	400.000.000,-	
09.10	X.XX.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Makassar	4 Unit	375.000.000,-	X.XX.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Makassar	4 Unit	375.000.000,-	
<b>Total Anggaran</b>				<b>18.354.088.458</b>	<b>Total Anggaran</b>				<b>18.354.088.458</b>		

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi dan perguruan tinggi melalui usulan Perangkat Daerah kabupaten/kota dan DPRD dalam bentuk pokok-pokok pikiran yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang sudah dilakukan.

Usulan tersebut bersesuaian dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel T-C.32 sebagai berikut :

**Nama Perangkat Daerah : DP3A DALDUK KB**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	<b>Program : PUG DAN Pemberdayaan Perempuan</b>		<b>Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi</b>	<b>35,50 %</b>	
	<b>Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi,</b>		<b>Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan perempuan yg mendapatkan pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan social</b>	<b>25,5 %</b>	
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Sul-Sel	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	48 Organisasi	Usulan Pokir : Risfayanti Muin, S.S Usulan Pokir : Rudy Pieter Goni, S.E., M.M Usulan Pokir : Rahman Pina S,IP M,SI Usulan Pokir : Ir. M. Arfandy Idris Usulan Pokir : Ir. Darmawangsyah Muin, M.Si Usulan Pokir : Ir. Andi Muhammmad Irfan AB Usulan Pokir : Hj. Rismayanti, SE
2	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>		<b>Persentase PUS peserta KB Aktif</b>	<b>65,35 %</b>	
	<b>Kegiatan : Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>		<b>Persentase kab/kota yang mengembangkan percontohan inovasi, advokasi, dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal</b>	<b>17,25 %</b>	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Sul-Sel	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1 Dokumen	Usulan Pokir : Fauzi Andi Wawo., S.Sos

	<b>Program : Pemenuhan Hak Anak</b>		<b>Persentase kab/kota Layak Anak</b>	<b>87,5 %</b>	
	<b>Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>		<b>Persentase kab/kota yg difasilitasi dlm pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, media, dan dunia usaha</b>	<b>84 %</b>	
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Sul-Sel	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	24 Organisasi	Usulan Masyarakat: Toraja, Soppeng, Selayar dan Pangkep
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA</b>		<b>Persentase kab/kota yg meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga</b>	<b>25 %</b>	
	<b>Kegiatan : Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>		<b>Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam peningkatan IPK daerah</b>	<b>17,5 %</b>	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Sul-Sel	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1 Dokumen	Usulan Masyarakat: Toraja Utara, Palopo
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>		<b>Persentase kab/kota yg menyediakan lembaga layanan Peningkatan Kualitas Keluarga</b>	<b>50,16 %</b>	
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan dan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>		<b>Persentase kab/kota yang menyediakan layanan pembelajaran keluarga terstandarisasi</b>	<b>45 %</b>	
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	24 Layanan	Usulan Masyarakat: Sinjai

	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN (PRIORITAS)</b>		<b>Persentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi</b>	<b>54,16 %</b>	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kab/kota yg difasilitasi dlm pengembangan model sinergi layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	13,5 %	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Sul - Sel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Usulan Masyarakat: Palopo
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>		<b>Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB</b>	<b>25,5 %</b>	
	Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Persentase kab/kota yang didampingi dalam penyusunan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	17 %	
	Sub Kegiatan : Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	- Dokumen	Usulan Masyarakat: Enrekang
	<b>PROGRAM PUG DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>		<b>Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi</b>	<b>35,50 %</b>	
	Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi,		Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan perempuan yg mendapatkan pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial	25,5 %	
	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	48 Organisasi	Usulan Masyarakat: Gowa, Sidrap, Takalar dan Pangkep

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

##### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPD Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026, secara khusus Misi (1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif dan Misi (4) Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter, DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) 2024 – 2026. Hal ini penting mengingat Renstra merupakan acuan implementatif bagi seluruh aparat DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan ini memuat visi, misi, arah dan kebijakan serta tujuan dan sasaran strategis.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan periode Tahun 2024 - 2026 ditetapkan dengan arah dan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatnya implementasi regulasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana sesuai SOTK dan pemanfaatan sistem data dan informasi.
2. Meningkatnya kualitas lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak didukung oleh kejelasan SOTK dan ketersediaan sarana dan prasarana
3. Meningkatnya peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak dan regulasi yang tersedia untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak , pengendalian kuantitas penduduk, dan peningkatan ketahanan keluarga
4. Meningkatnya pemanfaatan sistem data dan informasi untuk meningkatkan peran serta lintas lembaga dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penurunan total fertility rate.
5. Meningkatnya kualitas koordinasi dengan memanfaatkan sarana prasarana yg tersedia untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan menurunkan angka *total fertility rate*

Arah dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah DP3A Dalduk KB tersebut sejalan dengan kebijakan dan arah pembangunan nasional sebagaimana telah diatur pada Permendagri No. 90 Tahun 2019, tentang kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Adapun tujuan dan sasaran pokok rencana kerja Tahun 2024 tetap mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rancangan Rencana Strategis tahun 2024 - 2026 DP3A Dalduk KB Prov. SulSel, sebagai berikut :

#### **3.2.1 Tujuan :**

Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, dengan indikator tujuan :

**2.5.1** Nilai Indeks Pemberdayaan Gender

**2.5.2** Nilai Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP).

#### **3.2.2 Sasaran :**

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai yaitu :

- 1). Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan
- 2). Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- 3). Menurunnya Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR)
- 4). Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD

## BAB IV.

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sebagai tindak lanjut proses pencapaian tujuan, sasaran, pelaksanaan kebijakan dan arah pembangunan, maka ditetapkan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah DP3A Dalduk KB (2024 – 2026) Provinsi Sulawesi selatan sebagai berikut :

#### **A. PROGRAM PUG DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan**

*Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi*

- 1) Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
- 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi

*Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi*

- 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

#### **B. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN (PRIORITAS), dengan kegiatan dan Sub Kegiatan**

*Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan thd Perempuan Kewenangan prov
- 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Prov.

*Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.*

- 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota.
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi*

- 1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

#### **C. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan**

*Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi*

- 1) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Bagi Anak bagi Kewenangan Provinsi

*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan dan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi*

- 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

**D. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA DAN GENDER, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan**

*Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi i*

- 1) Penyediaan Data Gender dan Anak
- 2) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data

**E. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan**

*Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi*

- 1) Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi.*

- 1) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Kab/Kota
- 2) Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota

**F. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (PRIORITAS)**

*Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*

- 1) Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA Kewenangan Provinsi

*Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi.*

- 1) Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi

*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

**G. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**

*Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk*

- 1) Penyerasan Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)

*Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi.*

- 1) Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

**H. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA**

Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal

- 1) Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja
- 2) Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal

**I. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA**

*Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*

- 1) Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 2) Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK

*Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargai.*

- 1) Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga

**J. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**

*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

*Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah*

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

*Administrasi Umum Perangkat Daerah*

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 3) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 4) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 5) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tabel 99T-C.33  
**Rumusan Rencana Kerja Perubahan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

Urusan/ SKPD/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
			(Tahunan)						
PROGRAM PUG DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pemenuhan Indikator prasyarat PUG di Tk. Provinsi		65%	470.190.900,-			70%	1.050.000.000,-	
	Persentase ARG di Tingkat Provinsi		40%		.		43%		
	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi		35,50 %				36 %		
2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase OPD Provinsi yang Memenuhi Prasyarat PUG		85,5 %	49.968.700,-			86 %	430.000.000,-	
2.08.02.1.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan PUG di Tingkat Provinsi	Kab/Kota	1 Kebijakan	29.082.200,-	APBD PROVINSI		1 Dok	75.000.000,-	
2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Tk. Provinsi yang Memperoleh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Kab/Kota	48 Dokumen	14.481.200,-	APBD PROVINSI		48 Orang	235.000.000,-	

2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Tingkat Provinsi	Kota Makassar	1 Laporan	6.405.300,-	APBD PROVINSI		1 Dok	120.000.000,-
<b>2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Percentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan perempuan yg mendapatkan pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan social</b>		<b>25,5 %</b>	<b>420.222.200,-</b>			<b>26%</b>	<b>450.000.000,-</b>
2.08.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan/Profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yang diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik , Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab/Kota	24 Lembaga	420.222.200,-			48 Organisasi	450.000.000,-
<b>2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi yg terstandarisasi</b>		<b>0 lembaga</b>	<b>-</b>			<b>16 lembaga</b>	<b>170.000.000,-</b>
2.08.02.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab/Kota	0 lembaga	-	APBD PROVINSI		24 lembaga	75.000.000,-
2.08.02.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi / Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pada LPLPP Tingkat Provinsi	Kab/Kota	0 Orang	-	APBD PROVINSI		48 Orang	95.000.000,-

<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN (PRIORITAS)</b>	<b>Persentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi</b>		<b>54,16 %</b>	<b>1.071.970.140,-</b>			<b>58,33 %</b>	<b>1.550.000.000,-</b>
	<b>Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang terlayani</b>		<b>95 %</b>				<b>95 %</b>	
<b>2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase kab/kota yg difasilitasi dlm pengembangan model sinergi layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan		<b>13,5 %</b>	<b>125.083.700,-</b>			<b>14%</b>	<b>265.000.000</b>
2.08.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi (Sumber Dana DAK Non Fisik)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		1 Dokumen	101.668.000,-	<b>DAK NON FISIK</b>		1 Dokumen	155.000.000
2.08.03.1.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	24 Perangkat Daerah	23.415.700,-	<b>APBD PROVINSI</b>		24 Perangkat Daerah	110.000.000
<b>2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perempuan/anak korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan lanjutan komprehensif pada UPT PPA Provinsi</b>		<b>95%</b>	<b>916.721.640,-</b>			<b>95%</b>	<b>1.012.000.000,-</b>

2.08.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Kab/Kota	48 Orang	673.489.640,-	APBD PROVINSI		48 Orang	657.000.000
2.08.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi <i>(Sumber Dana DAK Non Fisik)</i>	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	24 Layanan	243.232.000,-	DAK NON FISIK		24 Layanan	355.000.000
<b>2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Persentase kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan perempuan yg terstandarisasi</b>		<b>37,75 %</b>	<b>30.164.800,-</b>			<b>38,50 %</b>	<b>273.000.000</b>
2.08.03.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	0 Laporan	0,-	APBD PROVINSI		2 Laporan	110.000.000
2.08.03.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab/Kota	48 Orang	30.164.800,-	APBD PROVINSI		48 Orang	128.000.000,-

2.08.03.1.03.03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Kab/Kota	0 Orang	0,-	APBD PROVINSI		24 Orang	35.000.000
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Persentase kab/kota yg menyediakan lembaga layanan Peningkatan Kualitas Keluarga</b>		<b>50,16 %</b>	<b>841.557.280,-</b>			<b>58,33%</b>	<b>825.000.000,-</b>
<b>2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah layanan edukasi Keluarga yang diedukasi oleh lembaga layanan pembelajaran keluarga tingkat provinsi</b>		<b>24 layanan</b>	<b>656.517.680,-</b>			<b>24 layanan</b>	<b>745.000.000</b>
2.08.04.1.02.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Bagi Anak bagi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Kota Makassar	3 Dokumen	656.517.680,-	APBD PROVINSI		3 Dokumen	745.000.000
<b>2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan dan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>Persentase kab/kota yang menyediakan layanan pembelajaran keluarga terstandarisasi</b>		<b>45 %</b>	<b>185.039.600,-</b>			<b>45,5%</b>	<b>80.000.000</b>
2.08.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab/kota	24 Lembaga	185.039.600,-			24 Lembaga	30.000.000

2.08.04.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab/Kota	0 Orang	0,-	APBD PROVINSI		48 Oang	30.000.000
2.08.04.1.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	0 Dokumen	0,-	APBD PROVINSI		150 Orang	20.000.000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Percentase kab/kota yang menyediakan Data Gender dan Anak yang Terupdate</b>		<b>88%</b>	<b>76.518.000,-</b>			<b>89%</b>	<b>425.000.000</b>
<b>2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Percentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tingkat Provinsi</b>		<b>86%</b>	<b>76.518.000,-</b>			<b>87%</b>	<b>425.000.000</b>
2.08.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Kab/Kota	2 Dokumen	53.388.000,-	APBD PROVINSI		2 Dokumen	265.000.000
2.08.05.1.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Kab/Kota	2 Dokumen	23.130.000,-	APBD PROVINSI		2 Dokumen	160.000.000
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (Prioritas)</b>	<b>Percentase kab/kota Layak Anak</b>		<b>87,5%</b>	<b>556.644.500,-</b>			<b>91,66%</b>	<b>645.000.000</b>

<b>2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>	<b>Percentase kab/kota yg difasilitasi dlm pelembagan PHA pada lembaga pemerintah, media, dan dunia usaha</b>		<b>84%</b>	<b>178.054.500,-</b>			<b>84,5 %</b>	<b>260.000.000</b>
2.08.06.1.01.0003 - Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	Kab/Kota	24 Perangkat Daerah	178.054.500,-	APBD PROVINSI		24 Organisasi	205.000.000
2.08.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	0 Dokumen	0,-	APBD PROVINSI		1 Dokumen	55.000.000
<b>2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>Percentase kab/kota yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak</b>		<b>55%</b>	<b>378.590.000,-</b>			<b>60 %</b>	<b>385.000.000</b>
2.08.06.1.02.0006 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	Kab/Kota	0 Kegiatan	0,-	APBD PROVINSI		1 Kegiatan	195.000.000
2.08.06.1.02.02 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	48 Orang	15.499.000,-	APBD PROVINSI		48 Orang	95.000.000

2.08.06.1.02.....Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Kab/Kota	2 Kegiatan	363.091.000,-	APBD PROVINSI		2 Kegiatan	95.000.000
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (Prioritas)</b>	<b>Percentase Kab/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi</b>		<b>54,16 %</b>	<b>113.206.400,-</b>			<b>58,33 %</b>	<b>575.092.400</b>
<b>2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase kab/kota yg difasilitasi dlm pengembangan model pencegahan kekerasan terhadap anak</b>		<b>17 %</b>	<b>28.169.400,-</b>			<b>17,5 %</b>	<b>235.000.000</b>
2.08.07.1.01.0003 Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang memperoleh Advokasi dan Pendampingan Dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	24 Orang	28.169.400,-	APBD PROVINSI		24 Organisasi	235.000.000
<b>2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Percentase anak korban kekerasan yang memperoleh layanan komprehensif</b>		<b>90,5%</b>	<b>16.013.000,-</b>			<b>91%</b>	<b>165.092.400</b>
2.08.07.1.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	40 Orang	16.013.000,-	APBD PROVINSI		24 Orang	55.000.000

2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	0 Orang	0,-	APBD PROVINSI		24 Orang	110.092.400,-
<b>2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang dikuatkan dan dikembangkan di tingkat provinsi dan lintas kab/kota</b>		<b>38 %</b>	<b>69.024.000,-</b>			<b>38,5 %</b>	<b>175.000.000</b>
2.08.07.1.03.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	1 Dokumen	69.024.000,-	APBD PROVINSI		1 Dokumen	130.000.000
2.08.07.1.03.0004 - Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	0 Kegiatan	0,-	APBD PROVINSI		1 Kegiatan	45.000.000
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB</b>		<b>25,5%</b>	<b>283.135.500,-</b>	<b>APBD PROVINSI</b>		<b>30 %</b>	<b>215.000.000</b>

<b>2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Percentase kab/kota yang didampingi dalam penyusunan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk</b>		<b>17 %</b>	<b>179.106.300,-</b>			<b>17,5 %</b>	<b>150.000.000</b>
2.14.02.1.01.0017 - Penyerasan Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasan Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kab/Kota	1 Domumen	179.106.300,-	APBD PROVINSI		1 Domumen	150.000.000
2.14.02.1.01.0003 - Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah kab/kota yg didampingi dlm penyusunan GDPK	Kab/Kota	0 Laporan	0	APBD PROVINSI		0 Laporan	-
<b>2.14.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah dokumen pengendalian penduduk yg tersedia di tk provinsi</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>104.029.200,-</b>			<b>2 Dokumen</b>	
2.14.02.1.02.0010 - Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab/Kota	1 Domumen	104.029.200,-			1 Domumen	65.000.000
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Percentase PUS peserta KB Aktif</b>		<b>65,35 %</b>	<b>30.589.700,-</b>			<b>65.36%</b>	<b>220.000.000</b>
<b>2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Percentase kab/kota yang mengembangkan percontohan inovasi, advokasi, dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal</b>		<b>17,25%</b>	<b>30.589.700,-</b>			<b>17, 5 %</b>	<b>160.000.000</b>

2.14.03.1.01.01 Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Kab/Kota	0 Laporan	-	APBD PROVINSI		1 Laporan	75.000.000
2.14.03.1.01.0012 - Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Kab/Kota	1 Dokumen	129.100,-	APBD PROVINSI		0 Dokumen	-
2.14.03.1.01.0006 - Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Kab/Kota	1 Dokumen	30.460.600,-	APBD PROVINSI		1 Dokumen	85.000.000
<b>2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>Persentase kab/kota yang menjadi lokasi pengembangan kemitraan pengelolaan pelayanan dan kesertaan ber-KB</b>		<b>25,5 %</b>	-			<b>26%</b>	<b>60.000.000</b>
2.14.03.1.02.01 Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab/Kota	0 Dokumen	-	APBD PROVINSI		1 Dokumen	60.000.000
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA</b>	<b>Persentase kab/kota yg meningkat capaian Indeks Pembangunan Keluarga</b>		<b>25,5%</b>	<b>1.276.616.000,-</b>			<b>26%</b>	<b>1.150.000.000</b>
<b>2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam peningkatan IPK daerah</b>		<b>17,5%</b>	<b>1.259.159.500,-</b>			<b>18%</b>	<b>865.000.000</b>

2.14.04.1.01.03 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab/Kota	1 Dokumen	1.891.800,-	APBD PROVINSI		6 Kab/kota	80.000.000
2.14.04.1.01.08 Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Kab/Kota	0 Organisasi	0,-	APBD PROVINSI		1 Organisasi	80.000.000
2.14.04.1.01.14 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Kab/Kota	1 Dokumen	1.257.267.700,-	APBD PROVINSI		1 Dokumen	705.000.000
<b>2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam pembentukan percontohan BKB, BKR, BKL, dan UPPKS</b>		<b>25,50 %</b>	<b>17.456.500,-</b>			<b>26%</b>	<b>285.000.000</b>
2.14.04.1.02.0008 - Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Kab/Kota	0 Organisasi	0,-	APBD PROVINSI		1 Organisasi	125.000.000
2.14.04.1.02.0003 - Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Kab/Kota	1 Laporan	17.456.500,-	APBD PROVINSI		1 Laporan	160.000.000

<b>X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Rata - Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah</b>		<b>Nilai 79</b>	<b>12.148.749.685</b>			<b>Nilai 79,5</b>	<b>12.698.996.057,87</b>
	<b>Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah</b>		<b>Nilai 95</b>				<b>Nilai 95,5</b>	
	<b>Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindak Lanjuti</b>		<b>100 %</b>				<b>100 %</b>	
<b>X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu</b>		<b>100%</b>	<b>227.840.000,-</b>			<b>100%</b>	<b>655.496.000</b>
X.XX.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	2 Dok	130.320.100,-	APBD PROVINSI		2 Dok	205.000.000
X.XX.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	1 Dok	4.234.600,-	APBD PROVINSI		1 Dok	8.500.000
X.XX.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	1 Dok	4.306.000,-	APBD PROVINSI		1 Dok	8.500.000
X.XX.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Makassar	1 Dok	15.511.100,-	APBD PROVINSI		1 Dok	7.500.000
X.XX.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Makassar	1 Dok	7.264.100,-	APBD PROVINSI		1 Dok	7.500.000,-
X.XX.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	6 Laporan	52.931.200,-	APBD PROVINSI		6 Laporan	268.496.000
X.XX.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	1 Laporan	13.272.900,-	APBD PROVINSI		1 Laporan	130.000.000

<b>X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu</b>		<b>100%</b>	<b>9.337.191.076,-</b>			<b>100%</b>	<b>8.745.000.057,87</b>
X.XX.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	12 Bulan	9.258.660.776,-	APBD PROVINSI		12 Bulan	8.650.000.057,87
X.XX.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar	2 Laporan	19.999.800,-	APBD PROVINSI		2 Laporan	25.000.000,-
X.XX.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Makassar	12 Laporan	52.780.700,-	APBD PROVINSI		12 Laporan	65.000.000,-
X.XX.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Makassar	1 Dokumen	5.749.800,-	APBD PROVINSI		1 Dokumen	5.000.000
<b>X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat Daerah berdasarkan kinerja ASN</b>		<b>Nilai Rata-Rata 78,5</b>	<b>4.690.000,-</b>			<b>Nilai Rata-Rata 79</b>	<b>80.000.000</b>
X.XX.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappannya	Makassar	0 Paket	0,-	APBD PROVINSI		1 Paket	75.000.000
X.XX.01.1.02.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Makassar	3 Dokumen	4.690.000,-	APBD PROVINSI		3 Dokumen	5.000.000
<b>X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>90%</b>	<b>778.313.500,-</b>			<b>95%</b>	<b>906.410.000</b>
X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Makassar	5 Paket	12.233.100,-	APBD PROVINSI		5 Paket	8.500.000

X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Makassar	9 Paket	115.805.000,-	APBD PROVINSI		20 Paket	250.000.000
X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Makassar	2 Paket	37.081.200,-	APBD PROVINSI		2 Paket	45.000.000
X.XX.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	4 Laporan	48.950.600,-	APBD PROVINSI		4 Laporan	75.000.000
X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab/Kota	5 Laporan	382.629.400,-	APBD PROVINSI		5 Laporan	730.000.000
X.XX.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	100 Dokumen	6.274.200,-	APBD PROVINSI		100 Dokumen	25.000.000
X.XX.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Makassar	3 Dokumen	175.340.000,-	APBD PROVINSI		3 Dokumen	200.000.000
<b>X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan kantor</b>		<b>85%</b>	<b>1.083.802.056,-</b>			<b>90 %</b>	<b>1.060.000.000</b>
X.XX.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	1500 Laporan	29.897.800,-	APBD PROVINSI		1550 Laporan	35.000.000
X.XX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Makassar	3 Laporan	118.630.400,-	APBD PROVINSI		3 Laporan	125.000.000
X.XX.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Makassar	5 Laporan	67.470.000,-	APBD PROVINSI		5 Laporan	35.000.000

X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Makassar	12 Laporan	867.803.856,-	APBD PROVINSI		12 Laporan	865.000.000
<b>X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>		<b>100%</b>	<b>716.913.053,-</b>			<b>100%</b>	<b>825.000.000</b>
X.XX.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Makassar	12 Unit	536.603.228,-	APBD PROVINSI		12 Unit	450.000.000
X.XX.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Makassar	2 Unit	180.309.825,-	APBD PROVINSI		4 Unit	375.000.000
<b>Total Anggaran</b>				<b>16.869.178.105,-</b>				<b>19.354.088.457,87</b>

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **4.1 Catatan penting**

Rencana kerja perubahan 2024 telah disesuaikan dengan Renstra 2024 - 2026 yang telah ditetapkan untuk menjadi acuan dalam rencana kerja tahun pertama 2024.

#### **4.2 Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan, yang disusun dengan mengacu kepada rancangan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan serta rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026. Rencana Strategis sebagaimana diketahui merupakan rencana umum jangka menengah yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara terfokus, rinci dan bertahap sesuai skala prioritas.

Kaidah-kaidah pelaksanaan rencana kerja ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban memberikan supervise yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja setelah ditetapkannya rencana kerja ini sebagai program dan kegiatan tahun 2024.
2. Para Kepala Bidang dan Sekretaris lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan target-target kinerja sasaran setelah ditetapkannya rencana kerja ini sebagai program dan kegiatan tahun 2024.
3. Para Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang membantu secara teknis Kepala Bidang/Sekretaris dalam pencapaian target kinerja dari setiap program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya setelah ditetapkannya rencana kerja ini sebagai program dan kegiatan tahun 2024.
4. Staf membantu Kepala Sub Bagian /Sub Bidang dalam melaksanakan program dan kegiatan masing-masing.

#### **4.2 Penutup**

Rencana Kerja (Renja) DP3A Dalduk KB Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan rancangan Renstra DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan 2024 – 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Rencana Kerja DP3A Dalduk KB sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan rutin dan pembangunan yang bersumber dari APBD Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan tetap mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja DP3A Dalduk KB Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2024 - 2026 diharapkan akan lebih akuntabel dan terukur.

